

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH - BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM
PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HERRY SUJANA

NIM. 500896409

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH – BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUNGAN

Herry Sujana

herryjayadi@gmail.com

**Program Pascasarjana
Universitas Terbuka**

Salah satu penyebab kurang optimalnya pengelolaan asset daerah yaitu karena system pelaporannya yang kurang memadai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan telah melakukan pelaporan assetnya menggunakan SIMDA-BMD sejak tahun 2013 dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sudah di rekomendasikan penggunaannya oleh BPKP agar pelaporan asset bisa optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi dari penggunaan aplikasi SIMDA-BMD , Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan menggunakan SIMDA-BMD dengan menggunakan pendekatan teori Edward III dengan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan . Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menilai aspek apa saja yang perlu dipertahankan dan aspek apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelaporan asset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Cara pengambilan data adalah dengan beberapa informan melalui teknik wawancara dan menggunakan telaah dokumen dengan data sekunder.

Temuan hasil penelitian yang dilakukan adalah secara keseluruhan pelaporan asset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan sudah memenuhi harapan berdasarkan data yang didapat dari enam orang narasumber pada dimensi Resources dalam hal sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Namun temuan hasil penelitian dari analisis data pada faktor Resources masih adanya operator yang kurang memiliki kemampuan menggunakan computer dan umur yang sudah tua, pada factor Communication dan Bureaucratic Structure perlu upaya lebih mengefektifkan dan memaksimalkan . Juga perlu komitmen yang kuat untuk memaksimalkan pelaporan asset tepat waktu dan harus terus di evaluasi secara berkala dengan menjadikan SIMDA-BMD sebagai standar pelaporan asset yang direkomendasikan oleh BPKP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Kata kunci: Pelaporan Asset, Simda-BMD , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTACY OF SYSTEM INFORMATION MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ASSETS (SIMDA BMD) IN MANAGING ASSET AT THE OFFICE OF EDUCATIONAL AND CULTURAL OF BULUNGAN REGENCY

Herry Sujana
herryjayadi@gmail.com
Post Graduate
Terbuka University

One of the causes that the less optimal in managing local asset is inadequate reporting system. The office of educational and cultural of Bulungan Regency has reported it assests using SIMDA BMD since 2013 in which the application is recommended by BPKP in order to optimize and to make the report accountable. The purpose of the study is to know how the optimalization of using SIMDA BMD application, what factors affecting in managing assets in the office of educational and cultural of Bulungan Regency by using SIMDA-BMD through Edward III theory with 4 factors that affects the implementation of the policy. The study can also be used to evaluate what aspects need to be maintained and improved to keep the quality of the report in the office of educational and cultural of Bulungan Regency.

The study is a qualitative study. The data was collected from the informers through structured interview and review literature as secondary data.

The result of the study says that generally the report of the assets done by the office of educational and cultural of Bulungan Regency have met the qualification based on the data collected from 6 resources of Resources dimension in the shake of infra structure which are available on the office of educational and cultural of Bulungan Regency. But the result from data analysis of Resources factor said that some operators did not have good qualification computer usage and the age is too old, on Comunication *and* Bureaucratic Structure factor need an effort to be more effective and maximized, moreover a strong commitment is needed to maximize the report on schedule and should be evaluated periodically and uses SIMDA BMD as a standard of asset report recommended by BPKP at the office of educational and cultural of Bulungan Regency.

Keywords: asset report, SIMDA BMD, the office of educational and cultural of Bulungan Regency

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah –
Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) Dalam Pengelolaan Aset Pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka
saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Selor, 2017

Yang Menyatakan



(Herry Sujana)
NIM. 500896409

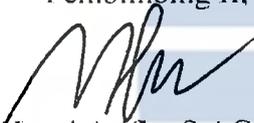
PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah –
Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) Dalam Pengelolaan
Aset Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Bulungan

Nama : Herry Sujana
NIM : 500896409
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Sabtu / 09 Desember 2017

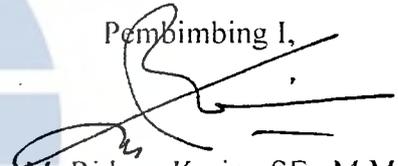
Menyetujui :

Pembimbing II,

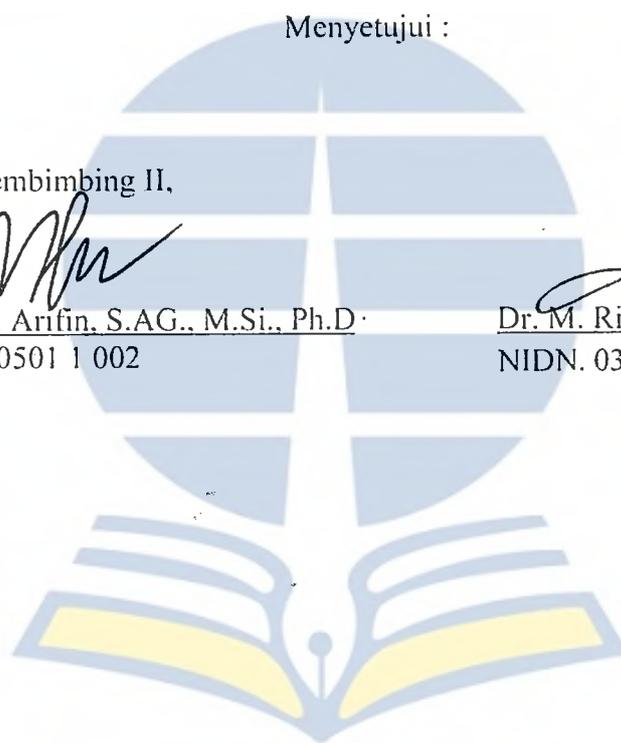


Muhammad Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D.
Nip. 19770828 200501 1 002

Pembimbing I,



Dr. M. Riduan Karim, SE., M.M.
NIDN. 0323116204



Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu / Program
Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.19591027 198603 1 003

Direktur,
Program Pascasarjana



Dr. Liestyandono Bawono Irianto, M.Si
NIP.19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Herry Sujana
 NIM : 500896409
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah –
 Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) Dalam Pengelolaan
 Aset Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada;

Hari/Tanggal : Sabtu / 09 Desember 2017
 Waktu : 08.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

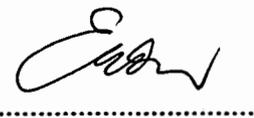
PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Darmanto, M.Ed.

Tandatangan



Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Endang Wirjatni TL, M.Si



Pembimbing I
 Nama : Dr. M. Riduan Karim, SE., M.M.



Pembimbing II
 Nama : Muhammad Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) Dalam Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan”.

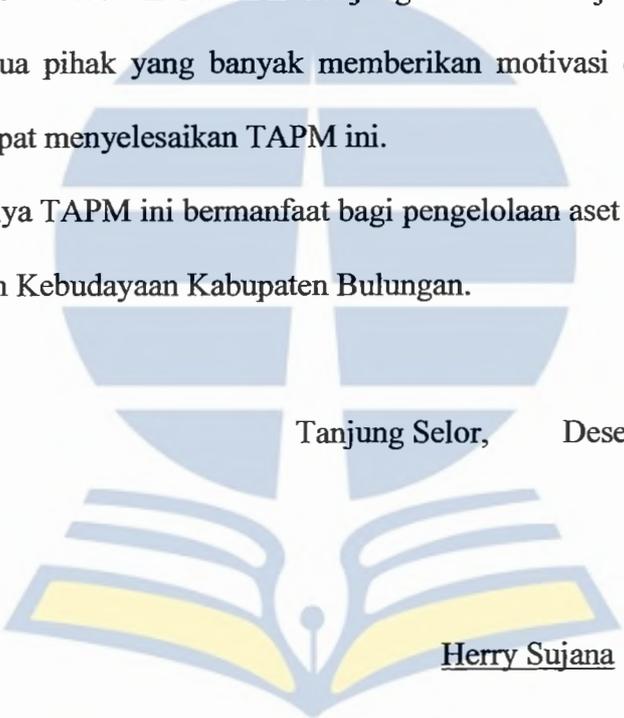
TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus dari program studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka. Penulisan TAPM ini dibantu oleh banyak pihak. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka atas dibukanya Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan menambah ilmu dan wawasan tentang pelayanan publik serta dapat menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Terbuka.
2. Kepala UPBJJ Tarakan selaku penyelenggara program Pascasarjana Magister Administrasi Publik.
3. Pembimbing I Dr. M. Riduan Karim, SE., M.M. dan Pembimbing II Muhammad Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan TAPM ini.
4. Bupati Kabupaten Bulungan atas pemberian izin belajar kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Magister Administrasi Publik Universitas terbuka.

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
6. Orang tua (alm.H Jayadi Idris / Hj.Sulastri. M.S) dan Istri dr.Widyawati Agustini, M.AP serta Nurhaliza herdy amalia dan Muhamad Islami Pasha yang banyak memberikan doa dan dukungan.
7. Teman – teman Kuliah UT MAP Tanjung Selor atas kerjasamanya.
8. Serta semua pihak yang banyak memberikan motivasi dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini.

Semoga nantinya TAPM ini bermanfaat bagi pengelolaan aset khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, Desember 2017



Herry Sujana

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

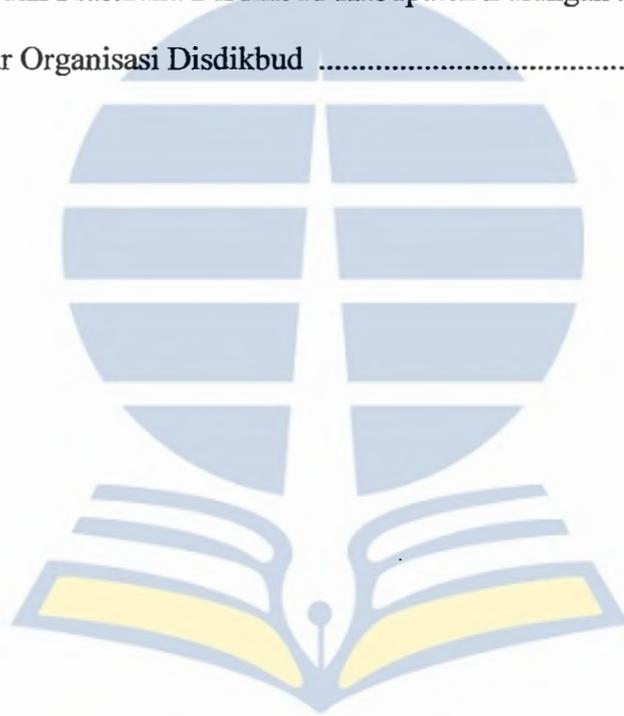
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



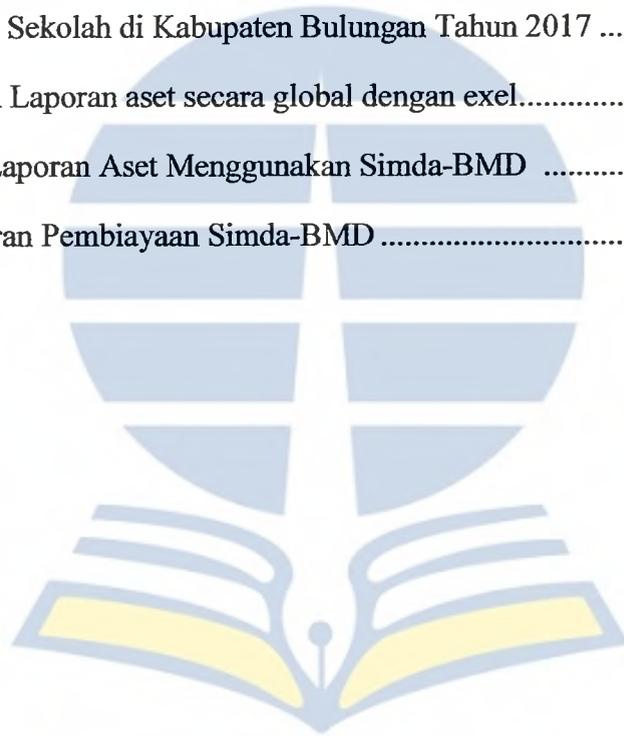
DAFTAR GAMBAR

2.1	Model Implementasi Menurut George C.Edward III	22
2.2	Kerangka Pemikiran Penelitian	38
4.3	Jumlah Informan	66
4.5	Launching Simda BMD Oleh Bupati Sekaligus Sosialisasi.....	77
4.6	Tampilan Aplikasi Simda-BMD.....	89
4.7	Sarana dan Prasarana Disdikbud Kabupaten Bulungan	92
4.8	Struktur Organisasi Disdikbud	101



DAFTAR TABEL

1.1.	Jumlah Sekolah yang melakukan pelaporan aset	5
1.2.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	6
4.1.	Jumlah sekolah di Kabupaten Bulungan Tahun 2016	55
4.2.	Jumlah Keseluruhan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56
4.3.	Jumlah Informan.....	63
4.4.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Bulungan Tahun 2017	71
4.5.	Contoh Laporan aset secara global dengan exel.....	79
4.6.	Hasil Laporan Aset Menggunakan Simda-BMD	81
4.7.	Anggaran Pembiayaan Simda-BMD	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan barang/aset milik negara atau milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang bermasalah dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik negara.

Tri Widodo Wahyu Utomo yang merupakan Deputi Bidang Inovasi LAN mengatakan, permasalahan tata kelola aset di daerah biasanya dipengaruhi antara lain, pengelolaan aset Negara yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak melalui prosedur, serta sumber daya manusia yang tidak memahami tentang administrasi pengelolaan aset tersebut.

Permasalahan pengelolaan aset baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak baik yang ada di pemerintah Pusat maupun Daerah, menyebabkan tak satu pun instansi pemerintah yang dapat menyajikan data secara rinci mengenai berapa sesungguhnya nilai aset yang dimiliki.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Chalimah Pujihastuti menambahkan, permasalahan dari pengelolaan BMN/BMD yang ada sekarang ini memang memerlukan solusi dalam pelaporannya guna menunjang pengelolaan aset yang baik. “Seharusnya pengelolaan BMN/BMD sudah diatur sejak tahapan perencanaan pembelian barang sampai pada pemusnahannya oleh satu unit khusus yang mengurus pengelolaan BMN/BMD. Sehingga data aset menjadi jelas,” (Sumber : <http://lan.go.id/choky/humas>).

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam pengelolaan aset daerah seperti yang dipaparkan diatas, pemerintah daerah hendaknya melakukan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah terkelola dengan baik dan optimal.

Untuk mengoptimalkan pelaporan aset/barang milik daerah yang sering terjadi masalah dalam pelaporannya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Tim Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Program aplikasi SIMDA-BMD adalah suatu program aplikasi yang di buat untuk memudahkan dalam pengelolaan aset daerah yang mana hingga Januari 2016 sudah digunakan

oleh 347 Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengelolaan aset secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan aset sesuai dengan permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Adapun permasalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidaktertiban administrasi dalam pelaporan aset. Permasalahan ini jelas menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki secara detail. Hal ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan aset tersebut semakin sulit untuk didata dan dilaporkan sehingga akan semakin bertambah banyak aset yang tidak diketahui.

Pembelian barang yang masuk dalam katagori sebagai aset oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama ini juga kebanyakan hanya untuk membeli dan bukan untuk mengelola bahkan mengabaikan pemanfaatannya. Aset atau barang yang sudah dibeli tidak lagi menjadi perhatian bahkan tidak pernah dilakukan pendataan secara memadai misalnya melakukan inventarisasi secara periodik. Sementara menurut Siregar (2004:518-519) ada beberapa tahapan manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventaris aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Apabila tahapan-tahapan tersebut di jalankan dengan baik akan memberikan manfaat

yang besar bagi pemerintah dalam pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Permasalahan tersebut di atas secara administratif menjadi kelemahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan aset. Selain itu jika masalah tersebut terus dilakukan pembiaran dengan tidak mengurus administrasi kepemilikan, inventarisasi aset dengan benar, Pengelolaan aset yang tidak dilakukan dengan baik menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah. Bahkan terjadi silang sengketa .

Permasalahan lain yang dikhawatirkan bisa saja terjadi penganggaran fiktif yang mana seolah-olah terjadi pengadaan barang namun karena lemahnya pengawasan barang tersebut dilaporkan hilang, atau rusak tidak berbekas. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya. Dimana diharapkan tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.

Dimana Idealnya laporan Aset daerah harus mencapai 100 % namun berdasarkan data permasalahan pengelolaan aset di Dinas Pendidikan dari 208 sekolah sejak 2013 yang seharusnya melaporkan asetnya, namun hanya sebagian saja seperti terlihat dalam table berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah yang Melakukan Pelaporan Aset

No	Tahun Pelaporan				Keterangan
	2013	2014	2015	2016	
1	40 sekolah	40 sekolah	35 sekolah	116 sekolah	Jumlah Sekolah per tahun
2	141,074,274,806.74	161,947,551,006.74	157,044,409,498.24	263,226,163,799.75	Jumlah Aset Tetap
3	3,243,946,846.35	3,963,778,646.35	2,693,554,546.35	2,932,448,486.20	Jumlah Aset Lainnya
4	144,318,221,653.09	165,911,329,653.09	159,737,964,044.59	266,158,612,285.95	Jumlah Aset

Sumber : Disdikbud Kab. Bulungan

Adapun penyebab Dinas pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan aset yang tidak tertib administrasi antara lain, sebagai berikut :

- a. Pelaporan belanja Modal oleh sekolah tidak dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan secara baik
- b. Kurang memahaminya sekolah-sekolah dalam pengelolaan asetnya
- c. Kurangnya perhatian para pejabat pengelola aset terhadap aset yang berada dalam penguasaannya
- d. Tidak adanya kesinambungan dalam pengelolaan aset karena setiap berganti kepemimpinan dan pengurus barang maka pengelolaan berikutnya tidak mengetahui masalah aset yang ada.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (*fixed asset*) tanah dan bangunannya. Akan tetapi dalam prakteknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat menjalankan manajemen aset dengan baik, ini dapat dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa hasil Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bulungan masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 1.2
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

No	Daerah	Opini Laporan			
		2013	2014	2015	2016
I	Bulungan	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : BPKP

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi lebih lanjut Implementasi SIMDA-BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mana nantinya diharapkan mampu mendukung tercapainya akuntabilitas pelaporan aset di Sekolah-sekolah maupun di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi SIMDA-BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan .

Melihat rumusan masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan implementasi Pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan menggunakan SIMDA-BMD.
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan menggunakan SIMDA-BMD

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan menggunakan SIMDA-BMD;
2. Untuk menganalisis Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan menggunakan SIMDA-BMD;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan manajemen aset pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam menyusun strategi pengambilan keputusan tentang manajemen pengelolaan aset daerah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam manajemen pengelolaan asetnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle 1980: 7). Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu dimana selanjutnya mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program (harsono:2002).

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Pengertian tentang implementasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam Winarno (2007:16) adapun istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek

sehari-hari dimana digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda.

Definisi lain dari kebijakan publik oleh James Anderson dalam Winarno (2007:18) menggambarkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Solichin Abdul Wahab (1997 : 64) , pengertian implementasi dirumuskan secara singkat, dimana "*to implementation* (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak / berakibat sesuatu).

Van Meter dan Horn (Horn, 1978 : 70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*". Makna Definisi tersebut antara lain adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan ini, dapat digunakan untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, antara lain : manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 65) : Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target team, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dimana akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan antara lain menghubungkan tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Sedangkan menurut Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibawa, mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Atas Dasar pandangan seperti tersebut diatas , Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan;

- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali pengertiannya disamakan dengan istilah *policy*. Dalam

hubungannya dengan kebijakan, kita mengenal dengan istilah konsep kebijakan publik yang dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah *policy*. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988:66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah, semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978:33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

3. Tahapan Implementasi Kebijakan

Proses dalam pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang

harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses – proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahapan. Tujuan dari pembagian adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap - tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32) adalah sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya publik masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang ada di agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy*

options) yang ada. Dalam ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit - unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran - ukuran atau

criteria - kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tahap - tahap Kebijakan, Penyusunan perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Agar efektifnya suatu implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut pendapat M. Irfan Islamy (Irfan, 1997 : 102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Solichin Abdul Wahab,

- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

4. Faktor-faktor Pendukung / Menghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Warwick (1979), pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu:

1. Faktor pendorong (*facilitating conditions*).
2. Faktor penghambat (*impeding conditions*).

a. Faktor Pendorong

- 1) Komitmen Pimpinan Politik : dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah diperlukan karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah.
- 2) Kemampuan Organisasi : dalam tahap implementasi program dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.
- 3) Komitmen Para Pelaksana (Implementers) : salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.

b. Faktor Penghambat

- 1) Banyaknya 'Pemain' (*actors*) Yang Terlibat Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya '*delay*' hambatan dalam proses pelaksanaan.

2) Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda

Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.

3) Kerumitan yang Melekat pada proyek itu sendiri

Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.

4) Jenjang Pengambilan Keputusan yang Terlalu Banyak

Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.

5) *Faktor Lain : Waktu dan Perubahan Kepemimpinan*

Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan.

5. Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III , (1980:1)

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“ Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan ”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

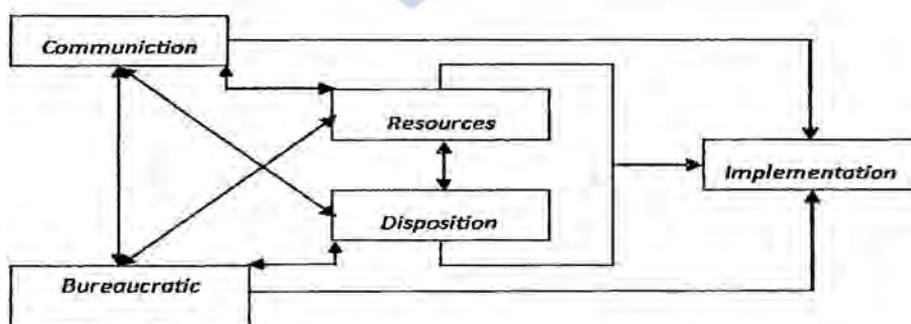
Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau

akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Comunication/komunikasi,
2. Resources/sumber daya,
3. Disposition/disposisi,
4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.



Gambar 2.1 Model Implementasi Menurut George C. Edward III

Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: *Kesatu Communication* menurut (Edward III, 1980:17) adalah:

”The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications”

Adapun persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirim ke personal yang sesuai sebelum dapat diikuti. Komunikasi ini haruslah akurat, dan harus pula dipahami secara akurat oleh pelaksana. Dikaarenakan banyak kendala terletak pada jalur transmisi komunikasi implementasi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun

membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor *Kedua Resources* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut menurut (Edward III, 1980:53) adalah:

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings,equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”

Salah satunya Yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang

terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan implementasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka seberapa jelas dan konsistennya pelaksanaan perintah dan seberapa akurat intruksi perintah , jika orang yang bertanggung jawab atas kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, penerapannya tidak akan efektif. Sumber daya penting termasuk staf dengan jumlah yang tepat dan dengan keahlian yang sesuai , informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan kepatuhan orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai keinginan dapat berjalan dengan baik ".

Faktor *Ketiga Dispositions* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut (Edward III, 1980:89) adalah:

"The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests".

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap terbuka untuk menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung *Dispositions* dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar mereka dapat menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

Faktor *Keempat Bureaucratic structure* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut (Edward III, 1980:125) adalah:

“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan dimana pelaksana mengetahui apa yang seharusnya

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi yang tidak menangani secara khusus kebijakan yang akan dijalankan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan di tetapkan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) secara merata atas kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor *Bureaucratic structure* yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggungjawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

6. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn (2004:79) yaitu:

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi antara lain :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: *pertama* yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua, sumber daya kebijakan, yang dikutip oleh Agustino (2006:142), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2004:77) bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan formasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

7. Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi dapat diorganisasikan dengan adanya gabungan antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber-sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. (O'Brien 2003)

Sistem informasi merupakan kumpulan interrelasional untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan, pengontrolan,

dan pengkoordinasian, penganalisaan masalah dan memvisualisasikan masalah yang kompleks didalam suatu organisasi. (Laudon 1998)

Sistem Informasi menganjurkan pengguna teknologi komputer didalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. (Bodnar 2000)

Dari teori-teori di atas dapat dikatakan bahwa sistem informasi adalah satu kesatuan hubungan antara manusia dengan komponen komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak, juga dengan sumber data yang membantu suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, pengontrolan, pendistribusian dan penyebaran informasi.

8. Teori Pengelolaan

Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen aset daerah atau barang milik daerah. Manajemen materi menurut Serdamayanti (2000) adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Syamsi (1983) yang dimaksud dengan perlengkapan daerah adalah perlengkapan materil atau milik Pemerintah Daerah, sedangkan manajemen perlengkapan daerah atau pengelolaan perlengkapan daerah adalah segenap proses penyelenggaraan

yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur melaksanakan dan mengontrol terhadap barang-barang milik Pemerintah Daerah, sehingga tercapailah efisiensi di bidang perlengkapan daerah. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah, barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang jasa.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah dijelaskan bahwa :
"Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupaun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya". Lebih jauh disebutkan barang milik daerah terdiri dari :

- a. Barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- b. Barang yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah, katagori dari barang daerah dikelompokkan kedalam 19 bidang, yaitu : Bidang Tanah, Bidang jalan dan jembatan, Bidang bagunaan air, Bidang instalasi, Bidang

Jaringan, Bidang bangunan gedung, Bidang monumen, Bidang alat-alat besar, Bidang alat-alat angkut, Bidang alat bengkel, Bidang alat-alat pertanian, Bidang alat-alat kantor dan rumah tangga, Bidang alat studio, Bidang alat kedokteran, Bidang alat laboratorium, Bidang buku/perpustakaan, Bidang barang bercorak kesenian, kebudayaan, Bidang hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan, Bidang alat keamanan. Selanjutnya disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang daerah, bahwa yang dimaksud dengan barang inventaris adalah "seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam buku inventaris".

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut : Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas transparansi, Azas efisiensi, Azas akuntabilitas dan Azas kepastian nilai. Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penaganggaran.
- b. Pengadaan.
- c. Penggunaan.
- d. Pemanfaatan.
- e. Pengamanan dan pemeliharaan.
- f. Penilaian.
- g. Penghapusan.
- h. Pemindahtanganan.
- i. Penatausahaan.
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Adapun menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).

Pada dasarnya kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis menurut Mardiasmo (2002) antara lain yaitu:

- a. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut
- b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Untuk optimalnya pengelolaan kekayaan milik daerah harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Menurut

Mardiasmo (2000) Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

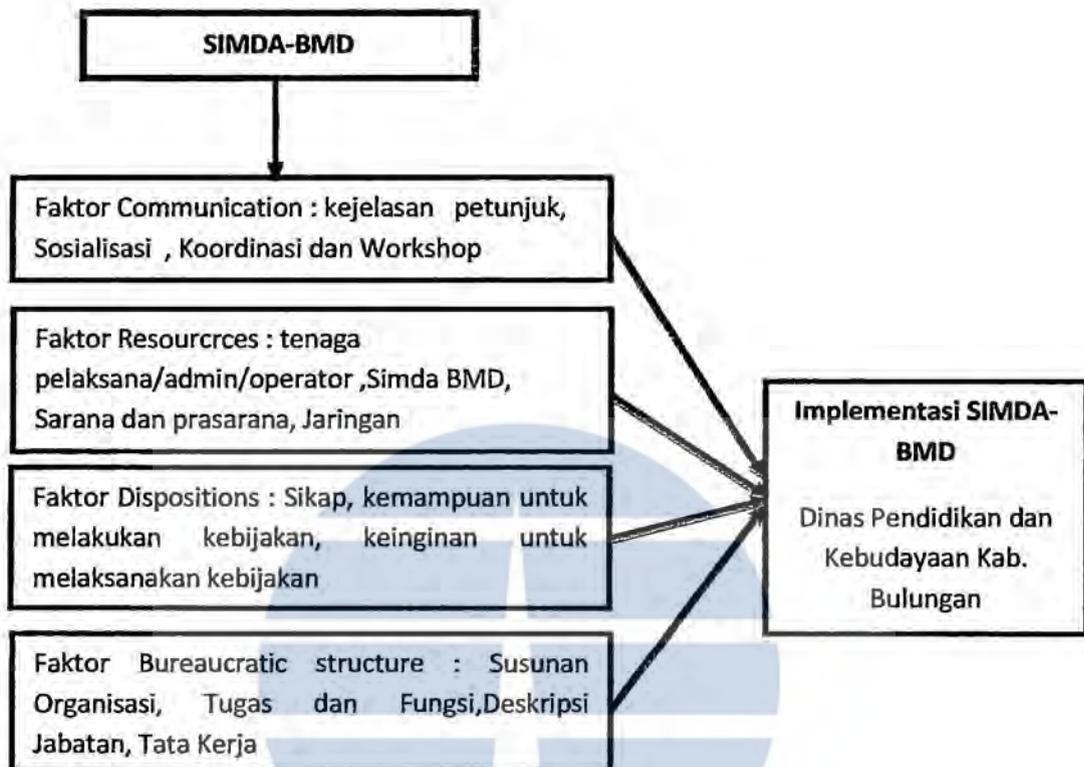
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probability and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan *compulsory competitive tendering contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

B. Kerangka Berpikir

Pada pengelolaan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan belum menjalankan manajemen aset dengan baik, ini

dapat dilihat dari laporan pengelolaan aset dari tahun 2013-2016 pelaporan asetnya yang bersumber dari dana APBD, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (bosda), Bantuan Operasional Sekolah Nasional (bosnas) dan hibah lainnya yang diperuntukkan kepada Sekolah-sekolah belum maksimal.

Melihat permasalahan dari pengelolaan BMD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan dihubungkan dengan teori George C Edwards III dimana implementasi dari pengelolaan BMD adalah dengan : 1. komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. 2. Salah satunya yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah sumber daya yang tersedia. 3. Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, Tapi juga harus mau melaksanakannya. 4. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Melihat dari teori diatas maka penulis membuat suatu kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Implementasi SIMDA-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan belum ada yang meneliti, namun sudah ada literatur yang tersedia. Hal ini berpedoman dan mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai manajemen aset diantaranya adalah:

1. **Endang Widayanti (2010)** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh manajemen aset yang terdiri dari aspek inventarisasi, identifikasi dan legal audit serta penilaian aset

terhadap optimalisasi aset pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling method* dan diperoleh 52 responden staf Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sragen. Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang berwenang dan terlibat dalam pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini terdiri dari Pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah yaitu Kepala Daerah, Pengelola Barang Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala UPTD, Pengurus Barang SKPD, dan Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang semuanya berjumlah 156 orang. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan *software* komputer untuk statistik SPSS versi 16.00. Analisis data dilakukan untuk normalitas data, asumsi klasik dan hipotesis. Hasil pengujian normalitas data dan asumsi klasik mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal dan tidak terjadi asumsi klasik autokorelasi, multikolinieritas maupun heteroskedastisitas sehingga pengujian hipotesis dengan model regresi berganda dapat dilakukan. Dalam pengujian regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa variabel inventarisasi, identifikasi dan penilaian berpengaruh terhadap optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Sragen. Namun demikian, legal audit atas aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten

sragen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) secara signifikan dipengaruhi oleh Inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset. Sedangkan variabel independent lainnya yaitu legal audit menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

2. **Syaiful Amry S (2014) Kebijakan Manajemen Aset Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan,** Penelitian Ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Manajemen Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Serta melihat kelebihan dan kekurangan dalam implementasi Kebijakan tersebut. Sesuai dengan fokusnya, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata, penelitian ini digunakan untuk mengkonstruksi realitas yang ada (Fact Finding). Lokasi difokuskan pada Bag. Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan yang bertugas mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing –masing SKPD. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan kebutuhan barang implementasinya mengalami kesulitan karena penetapan DPA belum sepenuhnya berdasarkan daftar kebutuhan barang milik daerah karena

ketidaksinkronan antara kebijakan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dalam pengelolaan aset dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappenas, Implementasi kebijakan manajemen aset daerah di Pemerintah Kota Medan belum semuanya terlaksana dengan baik karena masih ada beberapa kebijakan yang belum di Implementasikan dengan baik.

3. **Siti Nur Rokhmah Hidayati (2016), Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset RSUD Pandan Arang Boyolali**, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen aset di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam optimalisasi asetnya Penelitian ini Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) optimalisasi aset dipengaruhi oleh variabel inventarisasi aset, identifikasi aset, legal audit dan penilaian aset sebesar 65,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya, (2) variabel inventarisasi aset, dan legal audit berpengaruh positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap optimalisasi aset, dan (3) variabel identifikasi aset, dan penilaian aset berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada alpha 5% terhadap optimalisasi aset.
4. **Puspa Dinar (2016) Manajemen Aset Tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara**, Penelitian pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) yang difokuskan pada faktor inventarisasi aset, dan legal audit aset dari aset

tetap (tanah dan bangunan) pada pemerintah daerah di Kabupaten Bulungan. Dengan menggunakan metoda analisis data kualitatif. Analisis data Kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Proses kerja inventarisasi aset meliputi pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan menurut jenisnya, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Melihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap pengelolaan barang/aset beberapa diantaranya menggunakan pendekatan kuantitatif dan observasional. Penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada inventarisasi aset tanah dan bangunan, optimalisasi aset dan legal audit . Dari beberapa penelitian diatas didapatkan hasil yang berbeda-beda pada penilaian optimalisasi asetnya, dan memerlukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan Legal audit pada aset tanah dan bangunan. Penelitian Implementasi SIMDA-BMD ini ditujukan untuk menganalisis kualitas pada tingkatan pelaksanaan dan Implementasi SIMDA BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik obyek yang dinilai maupun desain penelitian yang dipakai yaitu dengan desain penelitian kualitatif serta olah data yang dipakai. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir teori Edward III yang menganalisis pada 4 faktor implementasi kebijakan yang sudah dimulai observasi awal bahwa masih terdapat keluhan-keluhan pada beberapa dimensi yaitu *Komunikasi* dan *Birokrasi*. Adapun metode analisis data dengan deskriptif analitik dan metode pengambilan data primer melalui wawancara mendalam dan menggunakan teknik purposive pada para operator serta pihak-pihak terkait dan pengambilan data sekunder dengan telaah dokumen.

D. Definisi Konseptual

a. Konteks (*Context*)

Konteks adalah kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Sasaran konteks mencakup kebijakan program penggunaan aplikasi SIMDA-BMD.

b. Masukan (*Input*)

Masukan adalah analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia. Evaluasi masukan mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi awal yang dimiliki oleh institusi untuk melaksanakan sebuah program. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi Implementasi dalam

menspesifikasikan rancangan prosedural. Sasaran evaluasi masukan adalah SDM petugas, sarana prasarana dan anggaran.

1) Sumber Daya Manusia.

a) Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan: kapid, kasi, operator SIMDA-BMD .

b) Komitmen adalah ide, sikap, tindakan dan ucapan dalam perhatiannya pada hasil dan hubungan kerja dalam rangka pelaksanaan Implementasi SIMDA-BMD.

c) Kepemimpinan Kepala Dinas adalah kepemimpinan yang berorientasi dengan memperhatikan kebutuhan petugas berupa penghargaan terhadap kinerja petugas.

2) Sarana dan prasarana adalah alat, fasilitas dan perlengkapan fisik maupun non fisik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Implementasi SIMDA-BMD.

c. Anggaran adalah biaya yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Implementasi SIMDA-BMD.

d. Proses (*Process*)

Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam implementasi kegiatan, sejauh mana program dilakukan dan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Sasaran evaluasi proses meliputi: perencanaan, penatalaksanaan, supervisi, monitoring dan evaluasi SIMDA-BMD.

e. Hasil (*Output*)

Merupakan tahap akhir evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan, dan dampak dari Implementasi. Kegiatan evaluasi meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional. Sasaran evaluasi hasil adalah cakupan hasil Implementasi SIMDA-BMD.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Herdiansyah, 2010: 9). Penelitian dilakukan pada obyek yang bersifat alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak memengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2009; hal 8-9).

B. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini mengacu pada proses analisa yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006:133), ada tiga komponen yang merupakan model yang saling terjalin atau model interaktif, yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (*fieldnote*). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian yang menekankan pada fokus tertentu, tentang kerangka konseptual dan bahkan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Penelitian ini hanya dibatasi pada kualitas implementasi SIMDA-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Pembatasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam wawancara dan pengumpulan hasil dokumenter. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian siap untuk disusun.

2. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan

pemahamannya tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematisnya, akan banyak menolong peneliti sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau ulang pada laporan-laporan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Dengan meninjau ulang laporan-laporan akan mempermudah dalam upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Lebih jelasnya data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

C. Sumber Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

2. Waktu Penelitian

- a. Persiapan : berupa penyusunan proposal, penyusunan alat pengumpul data dilakukan pada bulan februari sampai dengan minggu pertama bulan April tahun 2017
- b. Pelaksanaan : mulai pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, maupun telaah dokumen, pengolahan data dan analisis data dilakukan sejak minggu kedua bulan Juni 2017 sampai dengan minggu pertama bulan Oktober tahun 2017.

c. Penyusunan laporan penelitian dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni 2017.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrument sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap focus selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2009).

Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang implementasi Simda-BMD dalam pelaporan aset digunakan teknik Triangulasi. Menurut Flick (1992) dalam Denzin (2009) bahwa:

Triangulasi merupakan proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan dari suatu observasi ataupun interpretasi... Teknik triangulasi dapat juga digunakan untuk mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda terhadap berbagai fenomena.

Untuk memverifikasi data-data yang diperoleh dari aktor dengan aktor atau informan lainnya, atau dari informasi tertulis digunakan teknik triangulasi. Tujuannya agar data-data yang diperoleh tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang menjadi subjek atau informan penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengukur kualitas Implementasi Simda-BMD, informan yang diambil adalah yaitu Operator SIMDA-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Operator SIMDA-BMD Sekolah di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini terbagi dari beberapa tahapan. Tahapan pertama diawali dengan prosedur formal yakni mengajukan permohonan penelitian pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Tahapan berikutnya melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya melakukan eksplorasi data secara internal kepada pengurus barang. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kasubbag umum dan Kepegawaian serta Admin dan operator Simda-Bmd.

1. Data Primer

Data primer didapat melalui pengumpulan data di lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan rinci. Observasi yang dilakukan peneliti adalah langsung mengamati dan atau ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh narasumber. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Observasi dilakukan terhadap implementasi SIMDA-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Operator SIMDA-BMD Sekolah di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa menjawab pertanyaan peneliti secara tuntas, sehingga diharapkan bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek atau narasumber kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya serta interpretasi subyek atau narasumber tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti, sehingga permasalahan dalam penelitian ini bisa terjawab secara rinci dan bisa dipertanggung jawabkan. Wawancara dilakukan

adalah kepada operator SMDA-BMD yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan operator operator SMDA-BMD Sekolah di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data yang mendukung 4 faktor kualitas dari implementasi, wawancara juga dilakukan dengan pihak yang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan buku catatan dan camera.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip yang diperoleh dari, buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan/profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Tahun 2016, yang digunakan sebagai data pendukung.

3. Gambaran informan

Pada penelitian kali ini mengambil informan sebanyak 12 orang dan peneliti sendiri sebagai key informan. Informan lain selain peneliti terdiri dari lima orang operator Simda-BMD, informan lain yaitu Admin Simda-BMD yang bertugas sebagai leader Simda-BMD, pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Adapun karakteristik informan pengguna Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Umur informan

Karakteristik umur sesuai data-data yang ada bahwa dari lima informan Operator Simda BMD umur antara 35-56 tahun, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30-40 tahun sebanyak tiga orang, 40-56 sebanyak empat orang.

b. Pendidikan informan

Dilihat dari latar belakang pendidikan, bahwa dari lima informan admin dan operator Simda-BMD rata-rata pendidikannya adalah S1 Bidang Pendidikan, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan S2 Bidang Pendidikan sebanyak 2 orang, S1 Bidang Pendidikan dua orang. Pengurus Barang pendidikan strata I sebanyak satu orang.

c. Pekerjaan informan

Berdasarkan rekapan jenis pekerjaan lima informan operator Simda-BMD tersebut adalah PNS sebanyak tiga orang, dua orang adalah honorer, Pekerjaan informan lain adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

d. Jenis kelamin informan

Untuk jenis kelamin semua informan baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun operator Simda BMD adalah laki-laki.

e. Alamat informan

Sesuai data yang diambil dari delapan informan pelayanan 9 orang beralamat di perkotaan dan 2 orang kecamatan tanjung palas barat dan 1 orang dari tanjung palas utara .



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab dari rumusan masalah penelitian **Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Aset Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan** dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut dengan teori Edward III, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan merupakan sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara mempunyai luas 18.010,50 KM² terletak antara 116⁰04'41'' – 117⁰57'56'' Bujur Timur, dan 2⁰09'19'' – 3⁰34'49'', yang terdiri dari 10 kecamatan dan 81 Kelurahan/Desa, dengan jumlah Sekolah seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bulungan Tahun 2016

No	Kecamatan	Sekolah					Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	
1	Tanjung Palas	1	18	6	1	1	27
2	Tanjung Palas Barat	-	9	4	1	-	14
3	Tanjung Palas	1	12	4	1	1	19

	Utara						
4	Tanjung Palas Timur	1	13	7	1	-	22
5	Tanjung Selor	1	31	10	2	3	47
6	Tanjung Palas Tengah	1	13	5	-	-	19
7	Peso	1	11	6	1	-	19
8	Peso Hilir	-	6	5	-	-	11
9	Sekatak	1	12	4	1	-	18
10	Bunyu	1	6	3	1	1	12
Jumlah		8	131	54	9	6	208

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Jika keseluruhan sekolah tersebut melaporkan asetnya jumlahnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Keseluruhan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jumlah Aset Disdikbud Kab. Bulungan				Keterangan
	2013	2014	2015	2016	
1	208 sekolah	208 sekolah	208 sekolah	208 sekolah	Keseluruhan Sekolah
2	307,122,998,130.06	324,524,059,635.06	350,103,637,293.56	403,816,641,073.56	Jumlah Aset Tetap
3	9,598,453,885.00	9,598,453,885.00	9,599,253,885.00	2,932,448,486.20	Jumlah Aset Lainnya
4	316,721,452,015.06	334,122,513,520.06	359,702,891,178.56	406,749,089,559.76	Jumlah Aset

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

2. Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan merupakan satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan, Disdikbud Kab. Bulungan Organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan berdasarkan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Disdikbud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan bagi anak dengan menyelenggarakan fungsinya.

B. Implementasi SIMDA-BMD

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan yang mengaplikasikan aplikasi Simda-BMD. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan implementasi Simda-BMD dengan berpijak pada empat faktor yakni; (komunikasi, sumber daya, sikap dan stuktur birokrasi) yang mempengaruhi keberhasilan implemetasi Aplikasi Simda-BMD. Faktor komunikasi merupakan prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan Simda-BMD, karena suatu

kebijakan dapat berhasil dengan baik, ketika para pembuat kebijakan mentransmisikan petunjuk kebijakan dengan jelas, akurat dan tepat kepada pelaksana kebijakan. Keberhasilan Implementasi Simda-BMD sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut, dikarenakan Implementasi Simda-BMD merupakan kebijakan yang memiliki *kompleksitas* tinggi sehingga diperlukan komunikasi yang efektif baik dari segi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi Simda-BMD yang efektif. Sumber daya yang meliputi; sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan sumber daya yang ada (dana, sarana prasarana), ketersediaan sumber daya tersebut sangat mempengaruhi dalam implementasi Simda-BMD. Karena tanpa sumber daya, kebijakan Implementasi Simda-BMD tidak dapat diterapkan. Dalam melaksanakan kebijakan implementasi Simda-BMD diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kecukupan jumlah dan *skill* Pengurus barang dan *operator* sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Simda-BMD. Selain itu sumber daya informasi dan kewenangan tak kalah pentingnya dengan SDM, dikarenakan kebijakan Implementasi Simda-BMD merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah sehingga memerlukan koordinasi yang baik pada masing-masing pihak.

Keberhasilan implementasi kebijakan Simda-BMD juga dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik implementor dan *resipient* dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sikap atau disposisi memegang peranan penting dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan, jika para *implementor* memperhatikan suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi *implementor* dapat melaksanakan suatu kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif *implementor* ini berbeda dari para pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan menjadi rumit dan gagal. Begitupun yang akan terjadi dalam menerapkan kebijakan Simda-BMD, diperlukan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menerima dan melaksanakan sesuai dengan para pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi mengandung dua karakteristik utama yaitu Prosedur Pengoperasian Standar (*Standard Operating Procedure/ SOP*) dan *Fragmentasi*. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan Simda-BMD sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan SOP atau petunjuk pelaksanaan kebijakan aplikasi Simda-BMD dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang kompleks dan tersebar luas dalam penerapan kebijakan. Selain itu kebijakan penggunaan Simda-BMD merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi penyebaran tanggung jawab baik tingkat pusat sampai dengan tingkat

daerah. Dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi Simda-BMD diperlukan struktur birokrasi yang sistematis, dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan Penggunaan Simda-BMD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, paling tidak terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa Penggunaan aplikasi Simda-BMD tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka peningkatan mutu pelaporan aset daerah. Dalam hal ini pendekatan kebijakan yang digunakan adalah pendekatan dari atas (*top down policy*) yang dimaksudkan, untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan.

Kebijakan penggunaan Simda-BMD merupakan fokus kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pelaporan aset daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pada implementasinya dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah. Secara umum kebijakan ini merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekolah.

1. Permasalahan Implementasi Simda-BMD

Permasalahan yang muncul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait implementasi penggunaan Simda-BMD, *pertama*, adanya persepsi bahwa, Pelaporan asetnya masih bermasalah terutama di sekolah- sekolah , sekolah-sekolah yang belum mengaplikasikan Simda-BMD dengan baik hendaknya segera mengaplikasikan Simda-BMD, *kedua*, Belum adanya Aplikasi Simda-BMD yang dapat dipergunakan secara luas / online oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah-sekolah sehingga pelaporan asetnya masih secara manual.

Permasalahan yang ada di sekolah diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Eko Purdianto,S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Tg. Selor :

“Kebijakan Penggunaan Aplikasi Simda-BMD, hendaknya dilakukan workshop sesering mungkin agar operator di sekolah menguasai betul penggunaan aplikasi Simda-BMD tersebut ”. (Wawancara tanggal, 15 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan, diperoleh informasi bahwa, belum ada operator yang menangani laporan aset menggunakan Simda-BMD karena laporan biasanya dilaporkan ke Disdikbud dalam bentuk file

exel. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Sultonunnaim.SE selaku pengurus barang sekaligus sebagai operator Simda-BMD :

Selama ini laporan aset dari sekolah yang dilaporkan kepada kami dalam bentuk file Exel sementara laporan yang harus kami lakukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menggunakan aplikasi Simda-BMD sehingga kami harus memasukkan lagi data yang dari exel satu persatu ke dalam aplikasi Simda-BMD, belum lagi data yang diberikan terkadang tidak lengkap sehingga sangat menyulitkan kami. (Wawancara tanggal, 3 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa, belum adanya kesiapan dari sekolah untuk menggunakan aplikasi Simda-bmd dikarenakan kurangnya sumber daya yang mampu menggunakan aplikasi Simda-BMD, sebaiknya perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung upaya peningkatan kemampuan operator.

2. Hasil Penelitian

a. Keadaan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini karakteristik informannya adalah, Karakteristik informan penelitian ini membahas terlebih dahulu mengenai identitas atau karakteristik informan guna mendapat informasi yang akurat dalam menganalisis data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam pembahasan dan menganalisis tentang “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) Dalam

Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan”.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kaubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Admin Simda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah SMPN 1 Tg. Selor, Operator Simda SMPN 1 Tg. Selor, Kepala Sekolah SMPN 3 Tg Palas Barat, Operator SMPN 3 Tg Palas Barat, Operator SMPN 6 Tg. Selor, Operator SMPN 9 Tg. Palas Utara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Informan

Asal Informan	Informan	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas	1 orang
	Sekretaris	1 orang
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 orang
	Pengurus Barang	1 orang
	Admin Simda Disdikbud	1 orang
	Operator Simda Disdikbud	1 orang
SMP N 1 Tg. Selor	Kepala Sekolah	1 orang
	Operator Simda	1 orang
SD N 4 Tg.Palas Barat	Kepala Sekolah	1 orang
	Operator Simda	1 orang
SMP N 6 Tg. Selor	Operator Simda	1 orang
SD N 9 Tg. Palas Utara	Operator Simda	1 orang
Total		12 orang

Latar belakang pemilihan informan tersebut diatas berdasarkan tupoksi yang dilaksanakan pada instansi masing-masing sehingga diharapkan data yang diperoleh akurat dan akuntabel serta memiliki dasar yang kuat untuk digunakan penulis dalam penelitian. Dengan kualifikasi jabatan dan pendidikan informan diatas rata-rata, maka obyektifitas dalam memberikan informasi dan data mengenai Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada Sekolah dapat dijadikan rujukan sebagai koreksi dan perbaikan pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa informan diperoleh informasi bahwa, kondisi secara umum dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan pelaporan aset menggunakan aplikasi Simda-BMD, seperti yang disampaikan oleh bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bulungan, tentang komitmen dalam kebijakan Penggunaan aplikasi Simda-BMD, adalah:

Kita mau semua Sekolah-sekolah menggunakan aplikasi Simda-bmd dalam pelaporan asetnya ,memang mereka harus melaksanakannya karena untuk memudahkan pelaporan asetnya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tercipta pelaporan aset yang baik dan akuntabel. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd, melanjutkan :

“ Kenapa mereka harus menggunakan aplikasi Simda BMD ? karena dari sisi kemudahan pelaporan, kecepatan laporan dan diharapkan laporan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja modal ” (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Pernyataan bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd, diperkuat oleh Yunus Luat, M.Pd, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

...memang kita dinas pendidikan dan kebudayaan harus melakukan implementasi Simda-bmd dikarenakan pelaporan asset yang sebelumnya menggunakan aplikasi excel sangat menyulitkan admin di dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mengelola datanya karena sekolah yang ditangani sebanyak 193 sekolah. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Sul-tonunain. SE, selaku pengurus barang sekaligus operator Simda-BMD:

“...Saya rasa untuk kebijakan pelaporan aset menggunakan Simda-BMD disekolah-sekolah sangat membantu kami sebagai operator yang harus menangani semua data aset sekolah yang ada ” (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

3. Gambaran Pelaksanaan Implementasi Simda-BMD Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pengelolaan asset menggunakan Simda-BMD di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Informasi yang diperoleh dari informan tentang implementasi Simda-BMD dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, peneliti dalam melakukan penelitian adalah dengan cara wawancara mendalam yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhinya yaitu Komunikasi (Commuucation), Sumberdaya (reseuces), Sikap, (disposition atau attitudes), dan Struktur Birokrasi, (bureucratic structure) berdasarkan dengan model implementasi kebijakan Edward III (Leo Agustino 2006; 150).

Data dan wawancara secara mendalam telah diambil dan dikumpulkan dari SMP 1 Tanjung Selor, SMP 6 Tanjung Selor , SDN 4 Tg Palas Barat dan SDN 6 Tg. Palas Utara melalui tim pengelola Aset pada sekolah tersebut. Selain itu data juga diambil dan dikumpulkan dari tim Simda-BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Setelah pengumpulan data berikut ini disajikan gambaran deskripsi implementasi Simda-BMD pada sekolah tersebut dan kemudian dari hasil penelitian ini juga akan dibahas bagaimana pelaksanaan implementasi Simda-BMD pada sekolah tersebut yang sesuai dengan teori Edward III yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Simda-Bmd Dalam Pengelolaan Aset Di Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dari aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan kecenderungan-kecenderungan (disposisi).

Implementasi Simda-BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bulungan yang sesuai dengan empat variabel tersebut diatas adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan melibatkan informan yang peneliti anggap lebih mengetahui dan mengerti masalah-masalah yang diteliti terkait dengan Simda-BMD.

Dari setiap informan tersebut dilakukan identifikasi untuk mengenal lebih dekat masing-masing informan untuk memahami setiap karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan pertanyaan tentang sejauh mana implementasi kebijakan Simda BMD ini terdapat kendala dalam hal pelaporan asetnya, yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini pelaksanaan Simda-BMD ini yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk mengelola dan melaporkan Aset yang ada di sekolah harus memang menggunakan Simda-BMD dalam pelaporannya ke Dinas Pendidikan. (wawancara tanggal, 4 Agustus 2017)

Kemudian wawancara dilakukan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bulungan, seperti yang dikatakan informan yaitu bapak Agus Yuni Prasetyo, M.Pd selaku adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya semua stake holder yang terkait dengan Implementasi Simda-BMD tidak mengalami kendala atau hambatan Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kita dari Tim Simda-BMD telah melakukan sosialisasi dengan mengundang sekolah-sekolah (wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Dari hari wawancara tersebut diatas, bahwa implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tidak menemui kendala dalam hal pelaporan Asetnya. Apabila pelaporan aset yang dikelola oleh satuan pendidikan sudah memenuhi dan sesuai petunjuk teknis yang ada maka pelaporan aset segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan melalui Tim Simda-BMD. Dengan adanya kerjasama yang baik dari tim Pengelola aset di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan setiap sekolah akan memudahkan pelaksanaan Implementasi Simda-BMD dan kesesuaian pelaporan asetnya.

Akan tetapi, guna mendukung pelaksanaan Implementasi Simda-BMD ini dibutuhkan kesiapan dan komitmen satuan pendidikan dalam pengelolaan asetnya dengan segera melaporkan asetnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bulungan.

Seperti yang dikutip oleh Winarno (2002), menurut Lester dan Stewart bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah berjalan efektif dan efisien bila ditinjau dari segi sikap dan kemauan dari satuan pendidikan jenjang SMP dan SD terutama yang menjadi lokus penelitian adalah SMP 1 Tanjung Selor, SMP 6 Tanjung Selor, SDN 4 Tanjung Palas Barat dan SDN 9 Tanjung Palas Utara. Seperti yang diucapkan oleh Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd menyatakan bahwa :

Menurut saya Penerapan Simda-BMD sudah sesuai dan sangat membantu pelaporan aset yang ada di sekolah . Walaupun masih ada sekolah yang belum maksimal penggunaan Simda-BMD dapat tetap diberikan pendampingan dan pelatihan untuk mengurangi sekolah yang tidak melaporkan asetnya. (Wawancara, tanggal 4 Agustus 2017).

Selanjutnya menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Yunus Luat, S.Pd memaparkan, sebagai berikut :

Program ini sudah sangat memenuhi harapan kita semua dan sangat terbantu dan diharapkan tidak ada lagi laporan asetnya bermasalah. Diharapkan sekolah-sekolah pro aktif melaporkan asetnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan (Wawancara tanggal, 17 Agustus).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan belum mencapai

tujuan yang diinginkan dikarenakan masih adanya sekolah yang belum maksimal menggunakan Simda-BMD dalam pelaporan asetnya namun dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan pendampingan ke sekolah yang belum maksimal pelaporan asetnya.

Pada saat penelitian ini dilakukan ada perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang pendidikan yaitu bahwa pendidikan Menengah yaitu SMA/SMK diambil kewenangannya oleh Pemerintahan Provinsi dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara. Terhitung 1 Januari 2017 pengelolaan aset di SMA dan SMK pengelolaannya diurus oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pengelolaan Sekolah yang semula berjumlah 208 menjadi 193 dimana SMA dan SMK yang berjumlah 15 sekolah dikelola oleh Pemerintah Provinsi seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bulungan Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah			
		TK	SD	SMP	Jumlah
1	Tanjung Palas	1	18	6	25
2	Tanjung Palas Barat	-	9	4	13
3	Tanjung Palas Utara	1	12	4	17
4	Tanjung Palas Timur	1	13	7	21
5	Tanjung Selor	1	31	10	42
6	Tanjung Palas Tengah	1	13	5	19
7	Peso	1	11	6	18
8	Peso Hilir	-	6	5	11
9	Sekatak	1	12	4	17
10	Bunyu	1	6	3	10
Jumlah		8	131	54	193

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Dengan adanya perubahan kewenangan ini yang berlaku Januari 2017, Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak lagi mengelola data aset pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK Kabupaten Bulungan, sehingga Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK melakukan pelaporan asetnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Utara tidak lagi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Sebelumnya mekanisme pelaporan aset sekolah semuanya melalui tim aset dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dengan adanya perubahan kewenangan ini pelaporan aset untuk sekolah jenjang SMA/SMK

Kabupaten Bulungan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Utara.

Dengan Adanya perubahan tersebut, peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd tentang Kabupaten Bulungan tidak lagi mengelola pelaporan aset pada sekolah pada jenjang SMA/SMK yang terhitung berlaku sejak januari 2017 , yang menyatakan sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan memang tidak lagi mengelola pelaporan aset sekolah jenjang SMA/SMK, melainkan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Utara Propinsi. Sebenarnya hal ini sangat meringankan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dengan diambilnya SLTA ke provinsi otomatis sekolah yang kita tangani asetnya berkurang di Kabupaten Bulungan (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Pada kesempatan lain, peneliti juga melakukan wawancara pada Pengurus Barang, Bapak Sultonunaim, SE. yang menyatakan sebagai berikut :

Dengan adanya perubahan kewenangan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi , aset yang kami kelola yang sebelumnya cukup banyak jadi berkurang, Otomatis beban kerja kami berkurang, cuman tidak terlalu signifikan karena cuman 15 sekolah yang dialihkan dan ditangani oleh provinsi (Wawancara tanggal, 6 Agustus 2017).

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya perubahan tersebut sekolah jenjang SMA/SMK yang semula pelaporan asetnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan sejak 1 Januari 2017 sudah berpindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Utara.

Dengan melihat keadaan tersebut, peneliti akan menganalisa bagaimana implementasi Simda-BMD di sekolah tingkat SMP dan SD Kabupaten Bulungan dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi Simda-BMD dengan menggunakan teori Edwars III yang dengan indikator antara lain komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan kecenderungan-kecenderungan (disposisi).

a. Tim manajemen Simda-BMD

Langkah pertama dalam pengelolaan aset sekolah terlebih dahulu dapat membentuk Tim Simda-BMD dengan susunan tim personil sesuai dengan petunjuk tekhnis. Susunan tim yang terdiri dari pengurus barang, dan Admin merupakan tim inti. Tim inti tersebut yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dibantu oleh operator yang ada di sekolah yang bisa mengoperasikan komputer. Operator ini tugasnya adalah untuk menginput data aset. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah SMP 1 Tanjung Selor, tentang sumber daya dalam pengelolaan aset, menyatakan sebagai berikut :

operator kami tidak memiliki pendidikan/keahlian khusus dalam bidang teknologi untuk mengelola aset dengan Simda-BMD, sehingga perlu pelatihan penggunaan Simda-BMD, selain menginput data aset sekolah ,operator tersebut juga diberikan tugas lain, untuk mengentri data aplikasi DAPODIK. (Wawancara tanggal, 24 Agustus 2017).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa operator di sekolah tidak hanya mengelola data aset sekolahnya melainkan juga mengelola DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Hal ini juga bisa dikatakan bahwa sekolah juga masih kekurangan sumber daya dalam pengelolaan aset selain itu tidak ada regenerasi pada operator yang sudah tua sehingga banyak mengalami hambatan dalam mengelola data asetnya.

b. Sosialisasi SIMDA-BMD

Tahapan penting dalam persiapan Implementasi Simda-BMD adalah melakukan sosialisasi yang terkait dengan pelaporan aset. Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan juknis dan aturan Simda-BMD. Sosialisasi juga merupakan awal dari sarana komunikasi bagi sistem birokrasi untuk menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan.

Sosialisasi Implementasi Simda-BMD pada sekolah-sekolah hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Hal ini karena terkait dana yang disediakan oleh Kabupaten memang minim.

Sosialisai pada sekolah ini bertujuan untuk menyiapkan data sekolah untuk melaksanakan pengentrian data aset. Dimana tim aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola aset untuk mengelola dan mengecek data yang di entri.

Adapun untuk materi sosialisasi pada sekolah lebih bersifat teknis seperti halnya tentang sistem operasi, jaringan internet, pembukuan dan sistem pelaporan serta menyampaikan informasi yang tidak ada dalam juknis.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Simda-BMD

1. Faktor Komunikasi

Kebijakan penyelenggaraan pelaporan aset menggunakan aplikasi Simda-BMD ini dibuat oleh Pemerintah Pusat yang kemudian pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah disosialisasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau bertingkat, yaitu: sosialisasi pada tingkat kabupaten, dan sosialisasi pada tingkat sekolah.

Sosialisasi pada tingkat sekolah, sosialisasi dilakukan oleh dinas pendidikan Kab. Bulungan untuk menginformasikan program penyelenggaraan pelaporan asset daerah menggunakan aplikasi Simda-BMD kepada sekolah, dalam hal ini yang di undang adalah Kepala

Sekolah dan Operator Simda-BMD melalui kegiatan workshop penggunaan aplikasi Simda-BMD.

Berdasarkan hasil wawancara, cara penyampaian informasi atau transmisi program penyelenggaraan Aplikasi Simda-BMD diperoleh informasi bahwa, sosialisasi dilakukan melalui workshop, dan Rapat Koordinasi Program evaluasi pelaporan aset daerah, seperti yang jelaskan oleh bapak H.Jamaluddin Saleh S.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan.

Komunikasi dan komitmen terhadap terselenggaranya pelaporan aset yang akuntabel terus kami bangun bersama dengan Badan pengelola keuangan dan aset daerah Kab. Bulungan, karena pada dasarnya penyelenggaraana aset daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari yang awalnya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan secara konsisten dan penuh tanggungjawab. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Begitu juga dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan yang diambil oleh Disdikbud terkait sosialisasi dengan mengadakan workshop Simda-BMD untuk sekolah adalah wajib dilakukan agar sekolah-sekolah menguasai dalam penggunaan Simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2017).

Koordinasi Program Evaluasi pendataan aset Daerah. Sekolah telah memahami tentang materi yang disampaikan pada sosialisasi itu meliputi, penggunaan dan tujuan penyelenggaraan kebijakan pelaporan aset menggunakan aplikasi Simda-BMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Tg Selor:

“Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaporan aset daerah menggunakan aplikasi Simda-BMD melalui workshop, sudah kami pahami materinya, karena pada dasarnya isi materi tersebut jelas”. (Wawancara tanggal, 9 Agustus 2017).

Wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah SDN 4 Tg Palas Barat menyatakan bahwa :

“Kami mengyiapkan operator untuk mengikuti workshop Simda-BMD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan”. (Wawancara tanggal, 11 Agustus 2017).

Di lapangan ditemukan masalah komunikasi antara Sekolah dengan pengurus barang Disdikbud terkait penyelenggaraan pelaporan aset daerah menggunakan Simda-BMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sultonunaim. SE, selaku pengurus barang sekaligus operator Simda-BMD Di Disdikbud

Kab. Bulungan:

“Ada beberapa dari operator sekolah yang kurang memahaminya masalah penggunaan aplikasi Simda-BMD dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan informasi”.

Bapak Sultonunaim. SE melanjutkan :

“ada juga sekolah yang masih memberikan laporannya dalam bentuk file excel padahal kita sudah menggunakan aplikasi simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Tabel 4.5 : contoh laporan Aset secara global dengan excel

LAPORAN DAFTAR ASET

TANAH, PERALATAN DAN MESIN

NAMA UPB	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	BANGUNAN GEDUNG	JUM LAH ASET TETAP	ASET LAIN
SMPN 3 Tanjung Palas Barat	70,000,000.00	366,046,950.00	3,126,967,348.00	3,563,014,298.00	227,689,450.00

Sumber : Dsdikbud Kab. Bulungan

Di lapangan ditemukan juga adanya kendala tentang implementasi Simda-BMD. Informasi ini diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara bapak Agus Yuni Prasetyo, M.Pd selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dsdikbud Kab. Bulungan:

“masih ada sekolah yang belum dapat mengakses aplikasi simda-Bmd dikarenakan terkendala jaringan, dalam hal ini

pelaporannya tidak menggunakan database sehingga menghambat dalam pelaporan asetnya”. (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah SDN 4 Tg Palas Barat menyatakan bahwa :

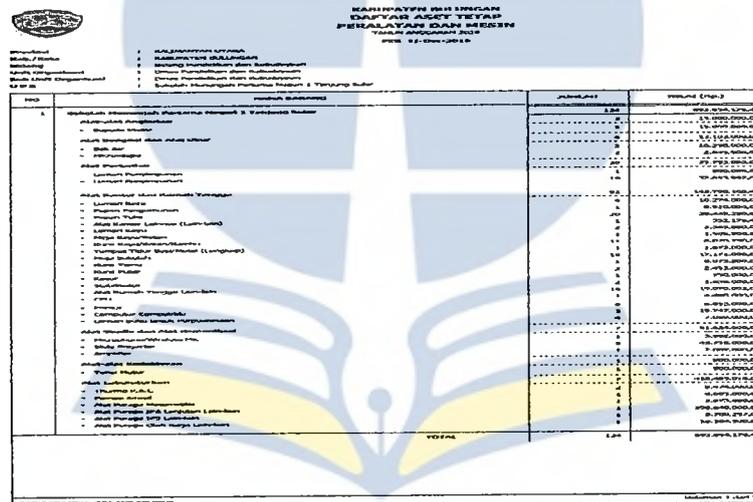
“lokasi sekolah kami sangat jauh dan jaringan internet kurang baik, kadang kami coba akses dikecamatan juga belum bisa jadi kami tidak dapat menggunakan aplikasi Simda-BMD secara online”. (Wawancara tanggal, 11 Agustus 2017).

Paparan tersebut menunjukkan bahwa, kurang berhasilnya pelaksanaan pelaporan aset menggunakan Simda-BMD pada tingkat sekolah sebagai implementasi kebijakan dilihat dari faktor komunikasi belum berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa, komunikasi yang terjalin antara Kepala Sekolah, Dinas pendidikan, dan Operator masih terjadi hambatan terkait kemampuan operator, laporan belanja modal, dan jaringan dalam penyampaian informasi kebijakan pelaporan aset menggunakan Simda-BMD. Terkait komunikasi terjadi di lapangan masih perlu dilakukan peningkatan secara intensif, agar tidak ada lagi informasi kebijakan yang diterima secara tidak utuh sehingga informasi yang ada dapat

berjalan sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan. Hambatan lain terkait faktor komunikasi juga terjadi antara Pengurus barang sekaligus operator Simda di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan terkait belum samanya persepsi kebijakan pelaporan data aset di sekolah yang seharusnya menggunakan aplikasi Simda-BMD namun laporannya masih secara global dalam bentuk file excel sehingga harus mengoreksi satu persatu kebenaran data tersebut.

Tabel 4.6 : Hasil Laporan aset menggunakan Simda-BMD



The screenshot shows the Simda-BMD application interface. At the top, there is a logo and the title 'KABUPATEN BULUNGAN DAFTAR ASET TETAP PERALYAN DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2016'. Below the title, there are several tabs and a list of assets. The main table has columns for 'KOD', 'NOMOR BUKU/SURAT', 'JENIS ASET', and 'NILAI ASET'. The assets listed include various types of vehicles and equipment, such as 'MOTOR', 'KENDARAAN', and 'PERANGKAT KOMPUTER'. The table is partially obscured by a watermark.

Sumber : Aplikasi Simda-BMD

2. Faktor Sumber Daya

Keberadaan faktor sumber daya dalam rangka implementasi kebijakan Implementasi Simda-BMD memegang peranan sangat peting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber

daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

Penyelenggaraan kebijakan Pelaporan aset menggunakan Simda-BMD cukup memadai dilihat dari sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan, karena yang menjadi pengurus barang dan operator sudah disiapkan, sementara untuk di dinas pendidikan juga sudah melakukan peningkatan peralatan komputer pendukung untuk menjalankan aplikasi Simda-BMD,

Dari sisi *skills* atau kemampuan pelaksana kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki keluhan yang cukup substansif, dikarenakan masih ada sekolah-sekolah yang operatornya kurang memahami menggunakan komputer, apalagi penggunaan Aplikasi Simda dalam pengentrian data aset yang ada di sekolah-sekolah.

a) Tenaga Pelaksana/operator

Sumber daya yang dimiliki Disdikbud Kab. Bulungan sudah memadai dalam menyelenggarakan Implementasi Simda-BMD, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa informan di bawah ini :
Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan :

Penyiapan SDM dan fasilitas pendukung aplikasi Simda-BMD terus kami lakukan, kami menyadari bahwa, untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi Simda-BMD tidaklah mudah. Perangkat computer Server,

Jaringan Internet kami siapkan, operator di Disdikbud sudah kita siapkan. Penyiapan operator disekolah-sekolah juga kami pikirkan bagaimana agar mereka dapat menguasai dan memahami menggunakan aplikasi Simda-BMD, kami minta juga kepada kepala sekolah memberikan honor bagi operator tersebut. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Faktor sumber daya, ini juga mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimana pun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai kemampuan dalam hal penggunaan komputer untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hasil wawancara dengan bapak Sultonunaim. SE, selaku pengurus barang disdikbud Kab.Bulungan:

Kalau sebelumnya data laporan aset, hanya data-data yang ada disdikbud Kab.bulungan karena kalau dilihat dari tahun ke tahun, tahun 2013-2016 data yang ada belum semuanya tercover data yang benar-benar riil hanya dari Disdikbud sementara data dari sekolah-sekolah hanya dalam jumlah keseluruhan tidak berdasarkan data yang rinci. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Bapak Sultonunaim. SE melanjutkan :

“ Kendala yang dihadapi masih ada operator dari sekolah yang ditunjuk yang umurnya 45 tahun keatas sehingga agak sulit untuk menggunakan Komputer dan menggunakan Simda-BMD sesuai Juknis sehingga memperlambat laporan menggunakan aplikasi Simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan, menurut Islamy (1994) akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negative (*unintended*). Ini berarti bahwa, konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan, maka dapat dijadikan alat salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yuni Agus Prasetyo, M.Pd, selaku Kasubbag umum dan kepegawaian Disdikbud Kab. Bulungan:

Saya kira Sekolah-sekolah itu harus siap mengimplementasikan aplikasi Simda-BMD, karena laporan aset mereka selama ini belum memadai dan laporannya masih secara global tidak terperinci, jadi mereka sekolah-sekolah tersebut hendaknya mempersiapkan operator yang memiliki kemampuan yang cukup guna mendukung implementasi penggunaan aplikasi Simda-BMD. (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Standar Kompetensi laporan aset yang diharapkan pada Sekolah-sekolah dalam penggunaan aplikasi Simda-BMD, antara lain Indikator keberhasilan pelaporan asetnya dari input yang bagus dari para operator sekolah antara lain dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berkurang

temuan dalam laporan asetnya.

Informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Yunus Luat,MPd, selaku Sekretaris Disdikbud Kab. Bulungan :

Faktor keberhasilan laporan aset dari sekolah yang pertama adalah, kalau laporan datanya dilihat dari aplikasi simda-BMD sudah berkurang kesalahan-kesalahan laporannya. yang kedua adalah, diharapkan kedepannya hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan sekolah-sekolah yang laporannya bermasalah juga berkurang. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2017).

Untuk peningkatan SDM operator simda-BMD yang ada di Sekolah-sekolah diselenggarakan berbagai jenis pengembangan seperti, workshop dan pelatihan-pelatihan secara langsung kepada operator yang datang secara pribadi kepada Admin Disdikbud guna memperdalam penggunaan aplikasi tersebut. Hal tersebut di atas diperkuat oleh Muhammad. S.Pd.I , selaku Admin Simda-BMD Disdikbud yang menyatakan bahwa:

“Sebagian dari operator-operator dari sekolah yang kurang menguasai cara penggunaan aplikasi Simda-BMD mereka datang sendiri atau berkelompok untuk belajar mengoperasikan aplikasi Simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Hal itu, diperkuat dengan pernyataan bapak Bambang Ari Gunawan. SE, selaku kepala sekolah SDN 4 Tg.Palas Barat

Kami perlu jelaskan mengenai sumber daya operator di sekolah kami, yang menjadi operator simda-BMD. Sebenarnya penerapan laporan menggunakan Simda-BMD sudah baik, namun di lapangan menemukan sedikit persoalan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut pada jaringan internet, dan operator yang kurang memahami menggunakan jaringan sehingga kami dan beberapa sekolah berinisiatif mengirim operator ke disdikbud untuk mengentri data. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Bapak Bambang Ari Gunawan. SE melanjutkan:

“Agar laporan yang di kerjakan oleh operator bisa akurat, kami selalu mengingatkan untuk membawa semua berkas-berkas yang diperlukan untuk di entri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan” . (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Pernyataan Operator SDN 4 Tg. Palas Barat mengatakan :

“Kami sebagai operator mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Simda-BMD sehingga dalam mengentri data kita meminta bantuan kepada admin maupun operator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan” (Wawancara tanggal, 11 Agustus 2017).

Dari paparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan: Sumber daya utama dalam

implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Demikian juga dengan mutu dalam laporan aset juga penting untuk diperhatikan.

b) Simda BMD

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif,

transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk **Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**, dengan tugas:

1. Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design **Data Base Management System (DBMS)**.
2. Memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Dengan adanya kebijakan tersebut hampir semua pemerintah daerah menerapkan aplikasi tersebut guna mendukung laporan yang akuntable demikian juga halnya Dinas pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang umum dan kepegawaian pun menerapkan pelaporan aset menggunakan Simda BMD, hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Agus Yuni Prasetyo, M.Pd selaku Kasubbag umum dan kepegawaian :

“Memang betul kita menerapkan aplikasi simda BMD di dinas pendidikan dan kebudayaan sejak tahun 2013 dimana sekolah-sekolah mengirimkan datanya ke Disdikbud nantinya data tersebut dikelola oleh operator Simda-BMD di Disdikbud”.

Bapak Agus Yuni Prasetyo, M.Pd melanjutkan:

“Namun baru pada tahun 2016 ini kita menerapkan aplikasi tersebut kesekolah-sekolah secara online Metode yang kita terapkan sekarang ini untuk mendukung lancarnya laporan aset yang selama ini terkendala, melalui dua cara yaitu secara Online maupun Offline”. (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).



Gambar 4.6 : Tampilan Aplikasi Simda-BMD

Dari paparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, Metode dalam pelaporan aset yang menggunakan jaringan komputer memiliki peranan yang sangat penting, dalam hubungan kelancaran dalam memberikan akses ke aplikasi Simda-BMD.

c) Fasilitas Sarana Prasarana

Faktor sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan dalam upaya implementasi Simda-BMD. Keberhasilan pelaksanaan pelaporan aset tidak hanya ditentukan SDM yang ada, akan tetapi dipengaruhi juga oleh perangkat pendukung, serta proses yang terjadi dalam Pengimputan data, proses pengimputan data akan dipengaruhi oleh keberadaan sarana yang dimiliki Disdikbud, sarana yang dimiliki sekolah yang digunakan oleh operator untuk melakukan aktivitas pengimputan data tanpa ada hambatan.

Secara teoritis sarana dan prasarana atau disebut sebagai fasilitas mencakup, seperti server, laptop jaringan Lan maupun Jaringan Internet. Aspek penting dari Server tersebut adalah kemampuan dan kehandalan untuk menangani banyaknya user dari sekolah-sekolah yang ada . Aspek lain yang diperlukan dari server tersebut dapat menerima inputan data secara bersama-sama. Sementara jaringan Local Area Network yang memadai untuk memberikan akses kepada operator yang ingin menginput datanya di kantor Disdikbud terutama bagi operator yang belum menguasai

penggunaan aplikasi Simda-BMD. Fasilitas lain seperti seperti jaringan Internet sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan pengentrian data secara online di sekolah masing-masing bagi operator yang sudah menguasai penggunaan Aplikasi Simda-BMD secara Online. Seluruh peralatan pendukung tersebut, digunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Keberadaan fasilitas yang demikian akan mendorong implementasi yang lebih baik.

Selanjutnya perbaikan-perbaikan terus dilakukan oleh pihak Disdikbud dalam rangka peningkatan mutu,kecepatan, keakuratan pelaporan hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak S.Muhammad. S.Pd.I, selaku Admin Simda Disdikbud :

“Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdikbud Kab. Bulungan saat ini sudah baik, dan sangat mendukung untuk kelancaran implementasi Simda-BMD”.

Bapak S.Muhammad. S.Pd.I melanjutkan

“ Server yang digunakan sekarang ini server yang baru dibeli, ada dua unit server yang digunakan untuk implementasi ini “(Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Hal ini juga diperkuat pernyataan bapak Matias Suda, S.Pd, selaku operator Disdikbud Kab Bulungan :

“Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdikbud Kab. Bulungan sudah sangat mendukung untuk kelancaran pelaporan aset”. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).



Gambar 4.7 : Sarana dan Prasarana Disdikbud Kab Bulungan

Terkait sarana dan prasarana yang ada di Disdikbud Kab. Bulungan, berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa, fasilitas yang dimiliki sudah memenuhi kriteria sebagai pengelola laporan aset, hal ini dipertegas berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Rajab,S.Pd.I , selaku operator SMPN 6 Tg Selor:

“Secara umum, fasilitas yang ada di Disdikbud sudah memadai, sudah kita coba untuk mengakses secara online aplikasinya dan berjalan lancar”

Bapak Abdul Rajab,S.Pd.I, melanjutkan :

“Kalau untuk entry data dari tempat kami sendiri, tidak ada masalah koneksinya cukup lancar untuk daerah Tanjung

Selor.” (Wawancara tanggal, 15 Agustus 2017).

Untuk wawancara dengan bapak Nicolaus Nuba , selaku operator SDN 4 Tg. Palas Barat:

“Kami sebagai operator mengalami kendala dalam mengakses aplikasi Simda-BMD secara online, karena tidak ada jaringan internet di tempat kami”. “(Wawancara tanggal, 11 Agustus 2017).

Melihat kondisi Organisasi Perangkat Daerah yang penulis teliti Kabupaten Bulungan yang memiliki 61 Organisasi Perangkat daerah seperti terlampir dalam lampiran menunjukkan bahwa, kebijakan implementasi Simda-BMD terkait sarana dan prasarananya harus menjadi perhatian sebagai salah satu upaya, untuk meningkatkan kualitas laporan asetnya.

d) Aspek finansial

Aspek finansial juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang implementasi Simda-BMD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana untuk melaksanakan implementasi Aplikasi Simda-BMD dan pembelian perangkat pendukungnya. Berdasarkan hasil studi dokumen, tentang pendanaan Implementasi Simda-BMD Disdikbud telah

menganggarkan untuk pembelian 2 unit server serta anggaran untuk kegiatan pelatihan dan monitoring.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan:

“Untuk Implementasi Simda-BMD kita sangat serius sekali agar implemetasi ini berjalan dengan baik, kita dukung dengan menganggarkan untuk kegiatan workshop, monitorig dan pembelian 2 unit server yang baru “(Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Hal ini juga diperkuat pernyataan bapak Sultonunain. SE, selaku pengurus barang sekaligus operator Simda-BMD Disdikbud Kab Bulungan :

“tanpa dukungan anggaran yang memadai rasanya sangat sulit untuk mengimplementasikan Simda-BMD ke sekolah-sekolah” (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Untuk lebih rincinya mengenai sumber pembiayaan penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD, mengacu pada data Disdikbud Kab. Bulungan dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel : 4.7 Anggaran Pembiayaan Simda-BMD

N	Tahun	Pendanaan	Keterangan	Sumber
1.	2014	150.000.000	Pendataan dan Monitoring	APBD
2.	2015	150.000.000	Pendataan dan Monitoring	APBD
3.	2016	300.000.000	Pendataan dan Monitoring Pembelian server	APBD

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa, faktor sumber daya sangat penting dalam mensukseskan implementasi Simda-BMD. Di lapangan penulis masih menemukan permasalahan-permasalahan terkait implementasi kebijakan Simda-BMD misalnya pada aspek sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan aspek yang menjadi *urgent* dalam mendukung proses pengimplementasian Simda-BMD di sekolah-sekolah yang menjadi obyek penelitian. Karena tanpa sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai keberhasilan implementasi Simda-BMD masih sulit untuk di wujudkan. Aspek finansial juga menjadi penting sebagai biaya operasional di Disdikbud, dalam hal ini Disdikbud sudah memberikan anggaran khusus untuk kegiatan Implementasi Simda-BMD di sekolah- sekolah. penganggaran ini dilakukan mulai pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.

3. Faktor Sikap/Disposisi

Salah satu Variabel Yang dipandang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah sikap implementor terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kecakapan saja tidak cukup, tanpa adanya kesediaan dan komitmen dari para implementator dalam menjalankan kebijakan publik. Sikap merupakan karakteristik yang dimiliki oleh para implementator, misalnya komitmen, jujur, dan demokratis.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan, kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan disposisi, pertama adalah sikap para staf dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana

merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Komitmen dan sikap dalam upaya mendukung dan mendorong keterlaksanaan penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd :

...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah harus menjadi bagian komitmen pemerintah daerah, dan hal ini juga menjadi komitmen Disdikbud untuk menyelenggarakan pengelolaan aset ini.

Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd melanjutkan :

Proses implementasi Simda-BMD ini tidak mudah, mulai dari laporan secara manual. Sampai sekarang kita sudah membuat system secara Online untuk memudahkan akses pelaporan, hal ini tidak mudah, mesti ada komitmen dan sikap yang kuat pada disdikbud maupun pada sekolah. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Komitmen juga ditunjukkan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, seperti yang diungkapkan oleh, bapak Yuni Agus Prasetyo,

M.Pd selaku Kasubbag Umum dan kepegawaian Disdikbud :

Salah satu tupoksi kami sebagai pengelola data aset di Disdikbud mempunyai komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan Simda-BMD ini, salah satu bentuk komitmennya adalah dengan merancang, menjadwalkan kegiatan pengentrian data agar laporan tepat waktu dan selalu

berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Komitmen yang sama terhadap penyelenggaraan Simda-BMD juga dikemukakan oleh bapak S. Muhammad. S.Pi selaku Admin Simda BMD Disdikbud :

Salah satu bentuk komitmen kami dalam mendorong keterlaksanaan Simda-BMD ini adalah dengan memberikan jadwal pengentrian lewat website, grup whatsapp dan mengajak operator di sekolah untuk sama-sama komit terhadap ketepatan waktu entri data laporan Aset menggunakan Simda-BMD.

Bapak S. Muhammad. S.Pd I melanjutkan :

Adanya dukung dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, atasan kita dinas pendidikan, sekolah. Komitmen dan kebersamaan kita di Disdikbud kita bangun, karena tidak akan ada kemajuan kalo komitmen kita tidak ada, karena dimulai dari Disdikbud terlebih dulu, Dukungan dari pihak luar juga penting jika tidak ada kerjasama dan koordinasi dengan pihak sekolah kayanya tidak akan berhasil. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD memerlukan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari dua sekolah yang diteliti, berkaitan dengan pandangan dan sikap *aktor/stakeholders* terhadap implementasi kebijakan, terutama menyangkut proses implementasi kebijakan pelaporan asetnya menggunakan Simda-BMD, maka temuan hasil studi dokumentasi dan wawancara secara mendalam menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan Implementasi imda-BMD pada aspek disposisi/kecenderungan telah dilaksanakan dengan optimal, baik dilihat dari sisi dukungan, pemahaman, komitmen dan

transparansi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik.

Komitmen dan sikap yang sama dalam upaya mendukung dan mendorong keterlaksanaan penyelenggaraan Simda-BMD juga ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunus Luat, M.Pd, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan diperoleh informasi :

Dinas pendidikan turut mendorong dan mendukung proses implementasi Simda-BMD yang ada di Kab. Bulungan khususnya di Disdikbud Kab. Bulungan, salah satu bentuk komitmennya adalah dengan menganggarkan kegiatan pelaporan aset menggunakan Simda-BMD setiap tahunnya, dan dalam APBD juga sudah dianggarkan.

Bapak Yunus Luat, M.Pd melanjutkan :

Mudah-mudahan dalam APBD 2018 dana untuk kegiatan implementasi Simda ini akan mendapatkan bantuan dana lagi untuk kegiatan pelatihan pada masing-masing sekolah karena pelatihan ini sangat perlu untuk menambah kemampuan operator-operator simda-BMD. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung dan mendorong sekolah-sekolah untuk dapat menggunakan Simda-BMD yang merupakan kebijakan Pemerintah, sangatlah diperlukan agar peningkatan mutu operator Simda-BMD menjadi lebih baik lagi. Faktor komitmen ini sangat diperlukan dalam implementasi Simda-BMD ini,

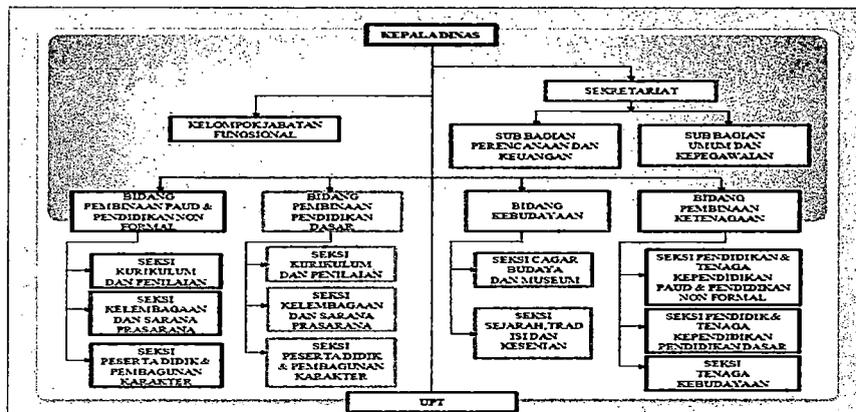
karena komitmen ini menjadi salah satu faktor keberhasilan pada implementasi Simda-BMD.

Dinas pendidikan dan Kebudayaan terkait komitmen terhadap implementasi Simda BMD ini, penulis temukan sudah maksimal, ini dapat dilihat dari komitmen terhadap pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Simda-BMD.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pada gambar berikut di bawah ini disajikan struktur organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan :



Gambar 4.8 : Struktur Organisasi Disdikbud

Secara umum, profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mengelola aset dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub bagian umum dan kepegawaian seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

b. Deskripsi Jabatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan fungsi tertinggi dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan. Penjelasan mengenai deskripsi jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan ini dan khususnya Sub bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
 - a. Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan Dinas.
 - b. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - Pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional bidang pendidikan.
 - Fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan meliputi program Wajar 9 tahun, sarana dan sarana pendidikan.
 - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
- c. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- d. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- f. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- g. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

- h. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- m. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- n. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- p. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Dari uraian tata kerja dari suatu organisasi berdasarkan teori Edward III fungsi komunikasi, sumber daya, sikap, dan birokrasi sudah terpenuhi secara garis besar namun Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah *fragmentasi*. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa *fragmentasi*, merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda, sehingga

memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa, pembagian tugas dan kewenangan (*fragmentasi*) menunjukkan bahwa, banyak pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut, namun puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada ditangan dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bulungan. Namun bidang atau seksi yang khusus menangani permasalahan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bulungan belum ada dalam struktur birokrasinya selama ini masih di tangani oleh staf pelaksana yg di diberikan SK pengangkatan sebagai pengurus barang di bawah pimpinan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dimana merupakan salah satu tufoksinya mengelola aset daerah khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta aset yang ada di sekolah-sekolah, sehingga ini juga merupakan kendala yang harus dihadapi mengingat tupoksi dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang di laksanakan cukup banyak seperti yang diutarakan Bapak Yuni Agus Prasetyo,M.Pd dalam wawancara berikut:

Kami selaku Kasubbag umum dan kepegawaian salah satu tupoksi kami adalah Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang, jadi implementasi Simda-BMD ini merupakan program kerja kami untuk memaksimalkan pelaporan aset daerah, namun idealnya ini harus ditangani oleh seksi yang khusus karena tupoksi kami cukup banyak juga. (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Penjelasan tersebut juga sudah dikemukakan oleh Bapak H.Jamaluddin Saleh. S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Bulungan:

Melihat dari Peraturan Bupati Bulungan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tugas dan fungsi dari subbag umum dan kepegawaian sangat banyak, Idealnya untuk pengelolaan aset daerah khususnya yang ada di Disdikbud memang harus ditangani oleh seksi sendiri.

Kepala Dinas H.Jamaluddin Saleh. S.Pd melanjutkan :

“Khususnya untuk menangani aset yang ada disekolah-sekolah ada baiknya jika dibentuk bidang atau seksi tersendiri untuk menangani pengelolaan aset mengingat aset yang ada di Disdikbud dan sekolah-sekolah sangat besar.” (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa, struktur birokrasi pada instansi pemerintah ada sedikit mengalami hambatan. sehingga dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD pada Disdikbud yang menjadi obyek penelitian, dari segi struktur birokrasi perlu dilakukan

penambahan seksi yang khusus untuk mengelola data dan aset daerah yang selama ini menjadi kendala, dan tidak adanya jabatan yang khusus menangani permasalahan aset di Disdikbud yang selama ini masih di lakukan oleh kasubbag umum dan kepegawaian sementara tupoksi jabatan tersebut masih terfokus hanya pada manajemen kepegawaian sehingga kurang maksimal dalam pengelolaan dan pelaporan aset sehingga dalam aspek manajerial masih lemah.



BAB V

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya dan berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun paparan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan Aset dengan system Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan masih ada hambatan dan kendala dalam hal adanya persepsi yang tidak sama antara operator Sekolah dengan Pengurus barang pada Disdikbud Kabupaten Bulungan di awal pengelolaan aset dan penerapan Simda-BMD terkait metode pelaporan aset menggunakan Simda-BMD yang belum sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) atau Prosedur Operasional Standar (POS).
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Simda-BMD berdasarkan teori George Edward III ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Komunikasi yang belum efektif dan perlu dibangun untuk memaksimalkan khususnya dalam hal penambahan pelatihan ,workshop atau sejenisnya agar para operator mampu melaporkan asetnya dengan Simda-BMD dikarenakan masih kurangnya kejelasan petunjuk dimana Sosialisasi yang dilakukan blm mampu diserap/dipahami oleh para operator khususnya dalam penggunaan Simda-BMD.
- b. Sumber daya pelaksana atau staf yang masih kurang dalam hal pengoperasian Simda-BMD dengan menggunakan komputer dan memiliki umur tidak lagi muda serta kemampuan pengoperasian aplikasi sesuai dengan petunjuk teknis, serta masih sulitnya jaringan internet didaerah-daerah terpencil.
- c. Disposisi (sikap pelaksana) menunjukkan kemauan yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan, namun masih kurang maksimal dalam hal pelaksanaannya ini dapat dilihat masih banyak sekolah yang belum melaporkan asetnya menggunakan Simda-BMD seperti terlihat pada table 1.1 yang pada tahun 2016 hanya 116 sekolah yang melaporkan asetnya dari 208 sekolah yang ada.
- d. Struktur Birokrasi yang sudah ada cukup baik, namun masih belum efektif dikarenakan tidak secara khusus menangani dan mengelola aset, melainkan hanya di tangani oleh seorang pengurus barang yang tidak memiliki jabatan dimana idealnya ditangani secara khusus oleh Kepala Bagian atau Kepala Seksi tidak digabung seperti saat ini dibawah

Kasubbag umum dan kepegawaian mengingat aset yang dimiliki sangat banyak.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan, dalam hal berkaitan dengan Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan perlu meningkatkan sosialisasi penggunaan Simda-BMD, koordinasi, dan monitoring pada sekolah-sekolah yang dilakukan pertriwulan atau persemester dalam setahun .
2. Mengenai Sumber Daya, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau staf/pegawai dalam hal pengelolaan Aset seperti perlunya dilakukan pelatihan penggunaan Simda-BMD baik di undang ke Disdikbud Kabupaten Bulungan atau dilakukan di sekolah sehingga kemampuan operator bertambah untuk memudahkan dan mempercepat pelaporan dan jika memungkinkan melakukan regenerasi operator yang berumur tua dengan yang lebih muda.
3. Berkaitan dengan Struktur Birokrasi, Perlu dibentuk birokrasi tambahan sub bidang sendiri khusus menangani aset daerah yang ada di Dinas Pendidikan dan Sekolah, untuk mempermudah koordinasi dan pengelolaan aset agar lebih terfokus sehingga implementasi kebijakan Implementasi Simda-BMD dapat berjalan dengan baik. Dan jika

memungkinkan lebih baiknya pengelolaan aset sekolah tersebut langsung dikelola oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulungan) karena memiliki bidang yang memang khusus untuk mengelola aset dan merupakan koordinator pengelolaan aset daerah di Kabupaten Bulungan yang mengelola 61 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bulungan.

4. Kelengkapan sarana prasarana dan kesiapan operator merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi Simda-Bmd Dalam Pengelolaan Aset, karena hal ini menjadi persyaratan bagi laporan aset yang akuntabel dan bertanggung jawab berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, (1997). *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Bodnar. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Texas : Congressional Quartely Press.
- Harsono, hanifah. (2002). *Implementasi Kebijakan dan politik*. PT. Mutiara Sumber Widya. Bandung.
- Herdiansyah, Haris. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Islamy, Irfan M, (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Andi
- Mayangsari, S dan Wandanarum, P. 2013. *Audit, Pendekatan Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- O'Brien, James. A. (2005). *Pengantar Sistem Informasi Perseptif Bisnis dan Manajerial*. Salemba.
- Serdamayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. (Bandung: Masdar Maju).

- Syamsi, Ibnu (1983). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Siregar, D. D. (2004). "*Manajemen Aset Strategi Strategi Penanataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutopo,H.B. (2006).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kualitative*. Bandung: Alpha Betha.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E .1975, *The Policy Implementation Process – A Conceptual Framework*,(*Journal Administration and Society*..
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- , Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan

-----, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

Arisandy Ambarita, 2016, "Analisis Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Aset Daerah (Studi Kasus : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara) *Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 5 No 4*

Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Haryono (2013), Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)

Supriyanto, Desember 2015, "Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember - Vol. 13 No. 2*

Veronika Mulalinda, Steven J. Tangkuman, 2014, Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro *Jurnal Emba 521 Vol.2 No.1*, Hal. 521-531

Wardhana, Iwan Henry, 2005, "Mengelola Aset Kota Jakarta", *Jurnal Kajian Pengembangan Perkotaan*, Vol. 1, No. 1, 7-10.

Endang Widayanti, (2010) Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)

Syaiful Amry S (2014) Implementasi Kebijakan Manajemen Aset Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Siti Nur Rokhmah Hidayati (2016), Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset RSUD Pandan Arang Boyolali

Puspa Dinar (2016) Manajemen Aset Tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan



Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Wawancara dengan Admin Simda BMD



Wawancara dengan Pengurus Barang Disdikbud



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Tgs. Barat



Wawancara dengan Operator Yg berumur 50 Thn



Sosialisasi Simda BMD di Disdikbud Kab. Bulungan

Sosialisasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan



PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan

1. Bagaimana kebijakan Implementasi Aplikasi Simda-BMD disosialisasikan oleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah ?
2. Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Implementasi Simda-BMD tersebut?
3. Media apa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi?
4. Berapa lama kegiatan sosialisasi Implementasi Simda-BMD dilaksanakan ?
5. Apa yang Bapak ketahui tentang kebijakan Implementasi Simda-BMD ?
Kebijakan ini merupakan penerapan PP no.....
6. Bagaimanan rekrutmen petugas / operator pelaksanaan kegiatan Implementasi Simda-BMD?
7. Berapa banyak petugas yang terlibat langsung dalam kegiatan Implementasi Simda-BMD di Disdikbud ?
8. Bisakah bapak Jelaskan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan Implementasi Simda-BMD tersebut ?
9. Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD?

PEDOMAN WAWANCARA

B. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bulungan

1. Bagaimana kebijakan Implementasi Aplikasi Simda-BMD disosialisasikan oleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah ?
2. Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Implementasi Simda-BMD tersebut?
3. Media apa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi?
4. Berapa lama kegiatan sosialisasi Implementasi Simda-BMD dilaksanakan ?
5. Apa yang Bapak ketahui tentang kebijakan Implementasi Simda-BMD ?
6. Bagaimanan rekrutmen petugas / operator pelaksanaan kegiatan Implementasi Simda-BMD?
7. Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh petugas/operator ?
8. Berapa banyak petugas yang terlibat langsung dalam kegiatan Implementasi Simda-BMD di Disdikbud ?
9. Bisakah bapak Jelaskan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan Implementasi Simda-BMD tersebut ?
10. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan Implementasi Simda-BMD?
11. Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD?

PEDOMAN WAWANCARA

C. Kepala Sekolah

1. Apakah bapak/ibu memahami hal-hal yang berkaitan dengan persiapan, dan pelaksanaan Implementasi Simda-BMD di sekolah ?

.....

.....

.....

2. Apakah Bapak/Ibu Kepala Sekolah mengetahui adanya sosialisasi Implementasi Simda-BMD ?

.....

.....

.....

3. Melalui media apa ibu/bapak memperoleh informasi tentang Implementasi Simda-BMD ? Apakah selama ini bapak/ibu menemukan permasalahan/kesulitan dalam melaksanakan Implementasi Simda-BMD di Sekolah ?

.....

.....

.....

.....

PEDOMAN WAWANCARA

4. Bagaimana mekanisme operator mengelola dan melaporkan asetnya ke Disdikbud Kab. Bulungan?

.....
.....
.....
.....

5. Sejauh mana kewenangan yang dimiliki sebagai pelaksana Implementasi Simda-BMD di sekolah ?

.....
.....
.....
.....

6. Bagaimana sarana dan prasarana di sekolah yang menjadi penunjang pelaksanaan Implementasi Simda-BMD ?

.....
.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kasubbag umum dan kepegawaian Di Disdikbud Kab. Bulungan

1. Persiapan apa yang telah bapak lakukan agar operator dari sekolah maksimal dalam memahami aplikasi Simda-BMD?

.....
.....

2. Apa ada metode tambahan yang diberikan dalam proses Implementasi Simda-BMD kepada operator sekolah?

.....
.....

3. Apa kendala yang dihadapi saat mempersiapkan operator dari sekolah dan bagaimana cara mengatasinya?

.....
.....

4. Dalam proses workshop penggunaan Simda-BMD, apakah ada permasalahan ?

Aplikasinya.....

perangkatnya.....

operatornya.....

5. Apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan kebijakan Implementasi Simda-BMD di sekolah-sekolah ?

.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA

B. Pengurus Barang Disdikbud Kab.Bulungan Simda BMD

1. Bagaimana Dukungan Pendidikan dan pelatihan bagi operator?

.....
.....

2. Apakah ada komitmen waktu yang ditetapkan dalam pelaporan aset menggunakan Simda-BMD?

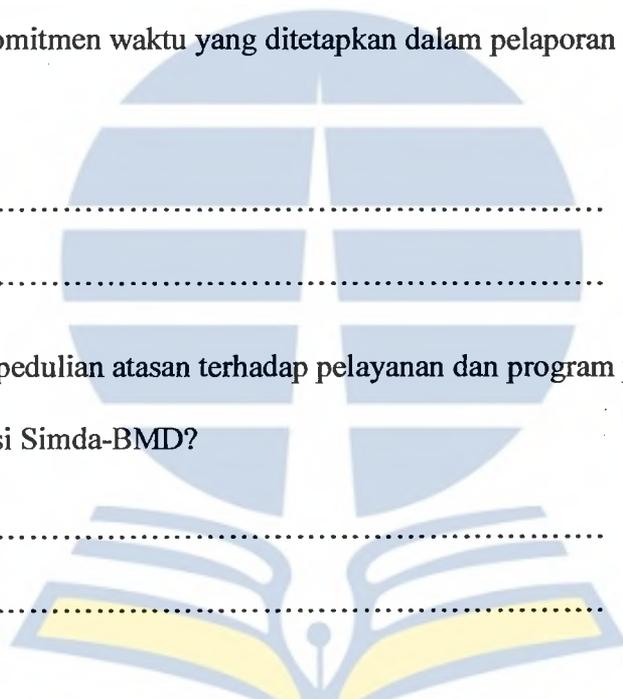
.....
.....

3. Bagaimana kepedulian atasan terhadap pelayanan dan program pelaporan aset dengan aplikasi Simda-BMD?

.....
.....

4. Bagaimana Kemampuan atasan melaksanakan kebijakan pelaporan aset dengan aplikasi Simda-BMD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ?

.....
.....



TRANSKRIP WAWANCARA

C. Admin Simda Disdikbud

1. Sejauh yang diketahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Implementasi Simda-BMD di sekolah?

.....

2. Bagaimana dengan laporan aset yang diinputkan oleh operator sekolah ke aplikasi Simda-BMD?

.....

3. Bagaimana kualifikasi laporan Simda-BMD Disdikbud Kab. Bulungan?

.....

4. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Simda-BMD ?

.....

5. Bagaimana dengan kesiapan sarana dan prasana yang dimiliki sekolah?

.....

6. Bagaimana teknis pelayanannya?

.....

7. Bagaimana dengan akses yang diberikan sekolah dalam rangka memberikan laporan Simda-BMD ?

.....

TRANSKRIP WAWANCARA

Operator Simda-BMD di Sekolah.....

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Simda-BMD di sekolah?

.....

2. Bagaimana dengan kesiapan sekolah dalam Implementasi Simda-BMD?

.....

3. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah?

.....

4. Kemudahan apa yang diberikan Dinas kepada operator untuk Implementasi Simda-BMD?

.....

5. Dalam hal komunikasi, bagaimana pihak Dinas memberikan informasi kepada Operator?

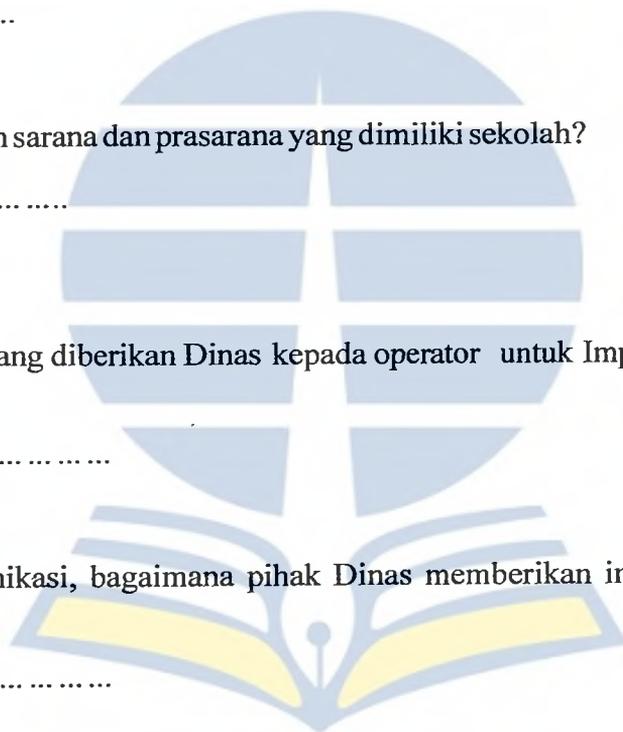
.....

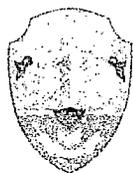
6. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala ketika menggunakan Simda-BMD dalam pelaporan aset ?

.....

7. Bagaimana dengan kesiapan pihak-pihak (pegawai) khususnya bendahara dalam memberikan data belanja modal kepada operator ?

.....





PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Kolonel Soetadji Telp./ Fax (0552) 2024081
 TANJUNG SELOR Kode Pos 77212



SURAT KETERANGAN

Nomor: 011/11977/Disdikbud.1.2/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNI AGUS PRASETYO, M.Pd
 NIP : 19700614 199702 1 008
 Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menerangkan bahwa

Nama : Herry Sujana, S.Kom
 NIM : 500896409
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 Alamat : Jl. Rawa Payau No. 22 RT 75 Tanjung Selor

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, guna mendukung penulisan tesis yang berjudul "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH/BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) DALAM PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUNGAN)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Selor, 17 November 2017

Kepala
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Yuni Agus Prasetyo, M.Pd
 NIP. 19700614 199702 1 008

Contoh Laporan aset Menggunakan aplikasi Simda BMD



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
REKAPITULASI BARANG PER UPB**

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE UPB	NAMA UPB	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	BANGUNAN GEDUNG	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET LAINNYA	KDP	JUMLAH ASET TETAP
8.1.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,520,000,000.00	49,896,429,871.45	10,117,584,316.00	932,412,800.00	2,694,352,964.00	19,082,686,226.00	85,243,466,177.45
8.1.1.32	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Selor	1,151,700,000.00	693,654,176.44	12,040,314,145.00	0.00	12,382,000.00	0.00	13,898,050,321.44
8.1.1.37	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjung Selor	876,400,000.00	89,488,555.00	567,950,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,535,713,555.00
8.1.1.78	Sekolah Dasar Negeri 04 Tanjung Palas Barat	132,000,000.00	72,897,885.00	8,290,600,000.00	0.00	3,760,000.00	0.00	8,499,257,885.00
8.1.1.96	Sekolah Dasar Negeri 09 Tanjung Palas Utara	228,800,000.00	58,050,000.00	800,267,366.00	0.00	550,000.00	0.00	1,087,667,366.00
	JUMLAH	4,908,900,000.00	50,810,520,487.89	31,816,715,827.00	932,412,800.00	2,712,919,964.00	19,082,686,226.00	110,264,155,304.89

Contoh Laporan sekolah Menggunakan Excel sebelum menggunakan Simda-BMD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS TIMUR

Alamat : Jl. H. Dg. Pattawari RT. 3 Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan

DATA HASIL BELANJA MODAL SEKOLAH DARI DANA BOSDA

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	MERK/MODEL	NO.SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL	KEADAAN BARANG			KTR.
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)	
1	Laptop	Azus				2014	1 bh	6.500.000	6.500.000	B			
2	Laptop	Azus				2014	1 bh	5.000.000	5.000.000	B			
3	Hardisc Eksternal 500 GB	Toshiba				2014	1 bh.	900.000	900.000	B			
4	Cas Laptop					2014	1 bh	620.000	620.000		KB		
5	Kursi Putar Kepsek					2014	1 bh	620.000	620.000	B			
6	Warles	Krezet				2015	1 bh	2.805.000	2.805.000	B			
7	Besi Pengaman/Tralis					2015	1 Set	6.695.000	6.695.000	B			
8	Batrai Laptop					2015	1 bh	900.000	900.000	B			
9	Corong	Toa				2015	1 bh	820.000	820.000	B			

Tanah Kuning, 6 Juni 2016

Kepala Sekolah

AKBAR, S. Ag.
NIP. 197408202003121005

Bendahara

HASTUTI
NIP. 198605082010012001

Contoh Laporan sekolah Menggunakan Excel sebelum menggunakan Simda-BMD

DATA HASIL BELANJA MODAL DAN HIBAH SEKOLAH TAHUN PENGELUARAN 2015

SKPD : DINAS PENDIDIKAN
UNIT : SDN 004 TANJUNG PALAS TIMUR
KAB / KOTA : BULUNGAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

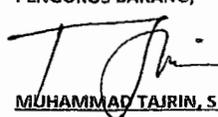
NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	MERK / MODEL	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	HARGA PEMBELIAN / PEROLEHAN			KEADAAN BAR.	
								BOSDA	BOSNAS	HIBAH	BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)
1	LAPTOP	Acer	14 Inc	Elektronik	2014	1	Rp 6.000.000,-	-	Bosnas	-	√	-
2	TENAGA SURYA	Tenaga Surya	100cmx50cm	Kaca	2015	1	Rp 3.500.000,-	-	Bosnas	-	√	-
3	MEJA PANJANG	-	350cmx50cm	Kayu	2015	1	Rp 1.305.000,-	-	Bosnas	-	√	-
4	KURSI PANJANG	-	200cmx50cm	kayu	2015	2	Rp 1.305.000,-	-	Bosnas	-	√	-
5	BEL SEKOLAH	Toa	10 Inc	Elektronik	2014	1	Rp 4.541.250,-	-	-	-	√	-
6	SARANA PENAMPUNGAN AIR BERSIH	Profil My Tank	LSPR-021-IDN	Plastik	2015	1	Rp 6.110.000,-	-	Bosnas	-	√	-
7	TERALIS PAGAR	Teralls	1 meter	besi	2015	3	Rp 2.000.000,-	-	Bosnas	-	√	-
8	KIPAS ANGIN	Tornado Stand	45 cm	Elektronik	2015	3	Rp 1.000.000,-	Bosda	-	-	√	-
9	KOMPOR & TABUNG GAS	Quantum	90cmx35cm	Besi & tabung	2014	1	Rp 1.542.250,-	Bosda	-	-	√	-
10	LCD PROJECTOR	Acer	12 Inc	Elektronik	2014	2	Rp 10.000.000,-	-	Bosnas	-	√	-
11	TANGGA LAEDER	Photovoltaic	80 Inc	Aluminium	2015	1	Rp 1.072.000,-	-	Bosnas	-	√	-
12	MODEM LIV	Beit	7 Inc	Elektronik	2015	1	Rp 800.000,-	Bosda	-	-	√	-
13	ALMARI	-	150cmx80cm	Kayu	2015	1	Rp 2.200.000,-	Bosda	-	-	√	-
14	MEJA LKS	-	150cmx50cm	kayu	2015	1	Rp 700.000,-	Bosda	-	-	√	-
15	STABILIZER / STAVOL	Grapika	14 Inc	Elektronik	2015	1	Rp 841.250,-	Bosda	-	-	√	-
16	MESIN DAF SANYO	Sanyo	16 Inc	besi	2015	1	Rp 1.041.250,-	Bosda	-	-	√	-
17	PLANG SEKOLAH	-	200cmx100cm	besi	2015	1	Rp 3.500.000,-	Bosda	-	-	√	-
18	KAMERA DI GITAL	Canon	7,5 Inc	Elektronik	2015	1	Rp 6.100.000,-	-	Bosnas	-	√	-
19	MEJA PERPUSTAKAN	-	150cmx50cm	kayu	2015	1	Rp 805.000,-	-	Bosnas	-	√	-

TANAH KUNING, 25 MEI

Mengetahui,
KEPALAH SEKOLAH


SARPUDDIN S. Pd. SD
NIP.19750923 200112 1 004

PENGURUS BARANG,


MUHAMMAD TAJRIN, S.
NIP.19871114 201101 1

Contoh Laporan sekolah Menggunakan Excel sebelum menggunakan Simda-BMD

43303.pdf

2/16
/16

DATA HASIL BELANJA MODAL SEKOLAH DARI DANA BOSDA Th. 2014 s/d 2015

SKPD : DINAS PENDIDIKAN
UNIT : SMPN 1 TANJUNG PALAS TIMUR
KAB/KOTA : BULUNGAN / TANJUNG SELOR
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Mrek/Model	No.Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
1	Printer	Canon		MP 287		2014	2	Rp 850.000	Rp 1.700.000		KB		
2	Kursi Puter	Sallvelo			Plastik	2014	5	Rp 650.000	Rp 3.250.000	B			
3	Ranjang UKS	Lokal			Kayu	2014	1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	B			
4	Tanggki Semprot Rumput				Plastik	2014	1	Rp 650.000	Rp 650.000	B			
5	Papan Pengumuman	Lokal			Kayu	2014	1	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	B			
6	Printer Canon IP 2770.	Canon	QC3-5062			2015	1	Rp 650.000	Rp 650.000	B			
7	Printer Scanner.MP.237	Canon		MP 287		2015	1	Rp 925.000	Rp 925.000		KB		
8	Tangga Aluminium	Danger		3 m	Aluminium	2015	1	Rp 900.000	Rp 900.000	B			
9	Bangku Panjang untuk Siswa	Lokal		3 m	kayu	2015	3	Rp -	Rp 2.300.000	B			
10	Printer MX 379	Canon		MX379		2015	1	Rp 1.825.000	Rp 1.825.000	B			
11	Alat Pel Lantai Otomatis	onder Mop				2015	3	Rp 900.000	Rp 2.700.000	B			
12	Tongkat Alat Fel Lantai				Aluminium	2015	3	Rp 200.000	Rp 600.000	B			

Mengetahui
Kepala Sekolah

Karmianus Udau S.Pd
NIP.197201012005021003

Desa Metun Sajau, 4 Juni 2016
Pengurus Barang


Debora Pabubung S.Pd
Nip.198412032009022003